



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS PERAN ORGANISASI KEPEMUDAAN
DALAM PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK
DI INDONESIA**

TESIS

A. BAGUS MAKKAWARU

0906596134

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI KAJIAN KETAHANAN NASIONAL**

JAKARTA

JULI 2011



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS PERAN ORGANISASI KEPEMUDAAN
DALAM PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK
DI INDONESIA PADA MASA REFORMASI**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

A. BAGUS MAKKAWARU

0906596134

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI KAJIAN KETAHANAN NASIONAL
PEMINATAN KAJIAN STRATEJIK
PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN**

JAKARTA

JULI 2011

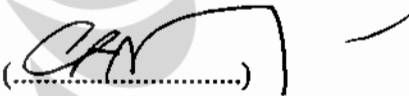
LEMBAR PENGESAHAN


Tesis ini diajukan oleh :
Nama : A. Bagus Makkawaru
NPM : 0906596134
Program Studi : Kajian Ketahanan Nasional
Judul Tesis :

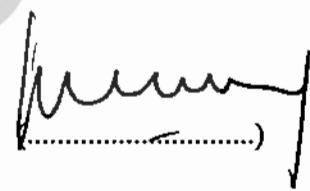
**“ANALISIS PERAN ORGANISASI KEPEMUDAAN DALAM
PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK DI INDONESIA”**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains (M.Si) pada Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Peminatan Kajian Strategik Pengembangan Kepemimpinan, Fakultas Pascasarjana, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Dr. Chandra Wijaya, M.Si, MM (.....) 

Penguji : Dr. H. Alfitra Salamm, APU (.....) 


Ketua Sidang : Dr. Amy S. Rahayu, M.Si (.....) 

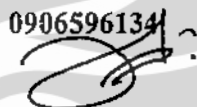
Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 12 Juli 2011

LEMBAR PERYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**



Nama : A. Bagus Makkawaru
NPM : 0906596134
Tanda Tangan : 
Tanggal : 12 Juli 2011

KATA PENGANTAR

Saya panjatkan puji serta syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan tesis ini. Tanpa hidayah dan keredhoan-Nya saya tidak akan sanggup melalui masa-masa sulit dalam menyelesaikan tugas ini.

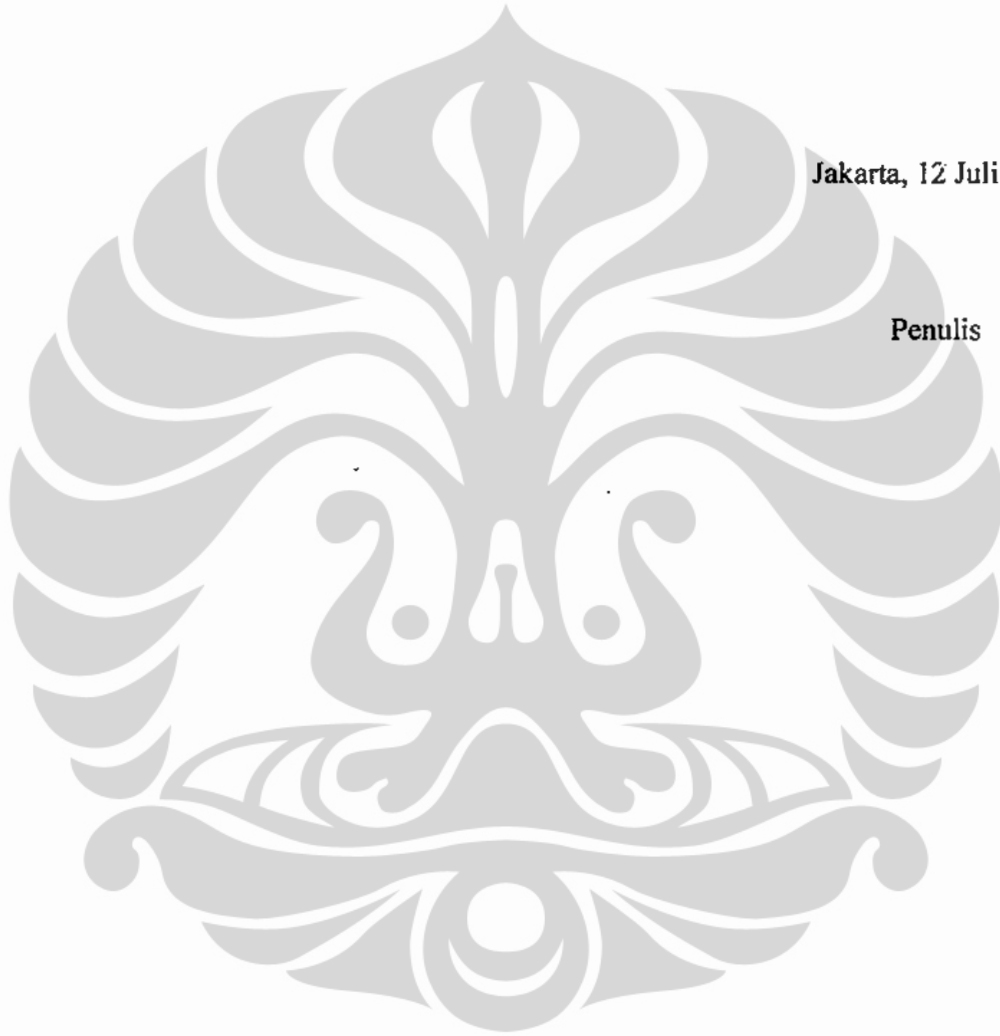
Tidak lupa saya sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan saya yang setinggi-tingginya kepada :

1. Kedua orangtua dan saudara saya, dan anak saya, Al Faris, yang saya cintai. Terima kasih atas motivasi, kerja keras dan bantuannya selama ini.
2. Istri saya tercinta yang dengan sabar dan tekun selama ini telah membantu dan mendampingi saya dalam menyelesaikan tesis ini.
3. Prof. Dr. Chandra Wijaya sebagai pembimbing dan juga Plh. Ketua Program pasca sarjana yang bersedia membimbing saya, meluangkan waktu diantara kesibukannya selama ini. Memberikan saran, suport dan motivasi dalam proses pengerjaan tesis ini, sekaligus sebagai.
4. Staf Sekretariat Program Pascasarjana yang sudah banyak membantu memfasilitasi penyelesaian tesis ini.
5. Narasumber, terima kasih atas kesediaanya meluangkan waktu, memberikan curahan pemikirannya dan membantu penulis dalam merampungkan tesis ini
6. Dosen-dosen semasa kuliah, terima kasih atas curahan ilmu dan pehatiannya selama ini. Membeikan secercah cahaya dalam kegelapan.
7. Teman satu bimbingan yang bersama-sama sharing pengetahuan dalam penyelesaian tesis ini.
8. Teman kuliah yang selama 2 semester ini telah bersama-sama berjuang menempuh pendidikan ini sampai selesai.
9. Rekan-rekan Kantor Komisi Pemilihan Umum, mulai dari jajaran Pejabat Sekretariat, terutama Kepala Bagian Teknis Pemilu, Kasubbag Daerah Pemilihan, dan Kasubbag Pencalonan yang menjadi atasan saya yang selama ini telah memberikan izin dan pengertian sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini dengan lancar.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih pada seluruh pihak yang telah banyak membantu, hanya Allah SWT yang dapat membalas ketulusan dan budi baik yang telah diberikan selama ini. Semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Saran dan masukan akan saya terima dengan senang hati untuk pembelajaran dan hasil yang lebih baik lagi.

Jakarta, 12 Juli 2011

Penulis



LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sabagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : A. Bagus Makkawaru
NPM : 0906596134
Program Studi : Kajian Ketahanan Nasional
Peminatan : Kajian Stratejik Pengembangan Kepemimpinan
Program : Pascasarjana
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Analisis Peran Organisasi Kepemudaan dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik Di Indonesia

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas Royalti Nonesklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 12 Juli 2011

Yang menyatakan



(A. Bagus Makkawaru)

ABSTRAK

Nama : A. Bagus Makkawaru
NPM : 0906596134
Program Studi : Kajian Ketahanan Nasional
Judul :

**Analisis Peran Organisasi Kepemudaan dalam
Pelaksanaan Pendidikan Politik Di Indonesia**

(i-x + 85 halaman; 37 buku + 5 sumber online)

Tesis ini membahas dan menganalisis peran organisasi kepemudaan dalam pelaksanaan pendidikan politik di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis dengan data primer yang diperoleh dari melalui wawancara mendalam serta data sekunder berupa dokumen resmi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga terkait permasalahan yang diteliti. Penulis menganalisis hasil penelitian dengan menggunakan konsep/teori peran, teori harapan, serta teori pendidikan politik. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa peran organisasi kepemudaan selama ini dalam melaksanakan pendidikan politik di Indonesia, dari perspektif teori pendidikan politik telah dijalankan dengan relatif baik. Namun, terdapat beberapa catatan mendasar, terutama yang berasal dari harapan stakeholder yang dirasakan belum dilakukan oleh organisasi kepemudaan dalam pelaksanaan peran tersebut. Catatan tersebut, antara lain terkait dengan tujuan pendidikan politik, frekuensi penyelenggaraan, serta materi yang menjadi konten dalam kegiatan pendidikan politik tersebut. Salah satu catatan yang paling penting, terkait persoalan yang muncul dalam Rencana Strategis Kemenpora tahun 2010-2014, yakni persoalan berupa adanya orientasi yang berlebihan di kalangan pemuda terhadap politik praktis seputar kekuasaan. Terhadap persoalan tersebut perlu dilakukan reorientasi di kalangan pemuda dengan memberikan pemahaman politik yang benar melalui kegiatan pendidikan politik. Rekomendasi lain yang dihasilkan dari penelitian ini adalah bahwa pihak Kemenpora yang menjadi leading sector dalam hal penyadaran dan pemberdayaan pemuda agar mengadakan atau meningkatkan frekuensi kegiatan-kegiatan pendidikan politik, yang dapat bekerja sama dengan organisasi kepemudaan yang ada.

Kata kunci : peran, organisasi kepemudaan, pendidikan politik

ABSTRACT

Name : A. Bagus Makkawaru
NPM : 0906596134
Major : Study of National Resilience
Title :

**Analysis of Youth Organizations Role in the Implementation of
Political Education in Indonesia**

(i-x + 85 pages; 37 books + 5 online sources)

This thesis discusses and analyzes the role of youth organizations in the implementation of political education in Indonesia. This research is a qualitative research in form of analytical descriptive research by utilizing primary data resulted from in depth interview and secondary data in form of official documents from the ministry of youth and sports related to the objects to be researched. The writer analyzes the research results by using role theories/concepts, expectancy theories, and political education theory. The research results revealed that all this time the role of youth organizations in implementing political education in Indonesia, from the perspective of political education theories are relatively well performed. Yet, there are some basic records, especially those that come from stakeholder expectations that have not been implemented by the youth organization in that role implementation. The records are related to the purpose of the political education, implementation frequency and the substances to become the content in the political education activities. One of the most important records, related to the problems occur in Strategic Plans of Kemenpora *Tahun 2010-2014*, is the problem in form of youth excessive obsession to practical politic and power. To address that problem, the reorientation is needed to be performed for the youth by providing the correct political understanding through political education. Other recommendation resulted from this research is that Kemenpora as the leading sector in youth empowerment and youth awareness development to set or to increase the frequency of educational education activities, that are able to cooperate with existing youth organizations.

Key words : role, youth organization, political education

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
1. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	10
1.5. Batasan Penelitian	10
1.6. Model Operasional Penelitian	12
2. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Konsep Peran	13
2.2. Konsep Organisasi	14
2.3. Pendidikan Politik	16
2.3.1. Kaderisasi Politik	19
2.3.2. Sosialisasi Politik	21
2.3.3. Partisipasi Politik	21
2.4. Teori Harapan	24
2.5. Operasionalisasi Konsep	25
3. METODE PENELITIAN	
3.1. Pendekatan Penelitian	26
3.2. Jenis dan Tahapan Penelitian	28
3.3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	29
3.4. Teknik Analisis Data	30
3.5. Panduan Wawancara	33
4. GAMBARAN UMUM ORGANISASI KEPEMUDAAN	
4.1. Berdasarkan Periodisasi	
4.1.1. Periode 1908 – 1928	35
4.1.2. Periode 1928-1945	37
4.1.3. Periode Pasca Kemerdekaan-Pra Orde Baru (1966)	39
4.1.4. Periode Orde Baru-1998	40
4.1.5. Periode Pasca 1998	41
4.2. Berdasarkan Klasifikasi Organisasi	
4.2.1. Organisasi Kepemudaan Sayap Parpol	42
4.2.2. Organisasi Kepemudaan Sayap Ormas	45

4.2.3. Organisasi Kepemudaan Independen	46
5. PEMBAHASAN	
5.1. Peran Organisasi Kepemudaan Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik	56
5.1.1. Organisasi Kepemudaan Sayap Partai Politik	57
5.1.2. Organisasi Kepemudaan Sayap Ormas	61
5.1.3. Organisasi Kepemudaan Independen	65
5.2. Analisis	69
5.2.1. Organisasi Kepemudaan Sayap Partai Politik	
5.2.1.1. Kaderisasi Politik	70
5.2.1.2. Sosialisasi Politik	72
5.2.1.3. Partisipasi Politik	72
5.2.1.4. Kesimpulan	73
5.2.2. Organisasi Kepemudaan Sayap Ormas	
5.2.2.1. Kaderisasi Politik	74
5.2.2.2. Sosialisasi Politik	74
5.2.2.3. Partisipasi Politik	75
5.2.2.4. Kesimpulan	76
5.2.3. Organisasi Kepemudaan Independen	
5.2.3.1. Kaderisasi Politik	76
5.2.3.2. Sosialisasi Politik	77
5.2.3.3. Partisipasi Politik	77
5.2.3.4. Kesimpulan	78
5.3. Harapan Stakeholder Terhadap Organisasi Kepemudaan Dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik di Indonesia	79
6. PENUTUP	
6.1. Kesimpulan	82
6.2. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Tahun 2010-2014, disebutkan beberapa potensi dan permasalahan pemuda pada masa reformasi saat ini. Dalam Renstra tersebut disebutkan bahwa potensi pemuda terdiri dari potensi di bidang ekonomi, bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan potensi di bidang sosial politik.¹

Di bidang ekonomi, potensi tersebut terkait dengan jumlah pemuda Indonesia yang berdasarkan data *single years* yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2009 menunjukkan bahwa jumlah usia pemuda 16 sampai 30 tahun adalah sebanyak 62.775 juta jiwa atau 27,31 % dari jumlah penduduk Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pemuda merupakan aset ekonomi yang penting dalam pembangunan dan perkembangan ekonomi di Indonesia, bukan hanya terkait kuantitasnya yang besar sebagai tenaga kerja, akan tetapi menyangkut pula sejauh mana kualitasnya. Dengan demikian, pemuda dalam kategori ekonomi (*economic category*) memiliki potensi kekuatan besar yang tampak dengan jelas dalam pembangunan perekonomian nasional. Bahkan di beberapa negara maju yang memiliki struktur penduduk piramida terbalik yang jumlah pemudanya lebih kecil dibandingkan usia tua menimbulkan kekhawatiran karena semakin besar rasio ketergantungan yang harus dipikul oleh usia produktif. Dengan demikian, posisi pemuda tidak hanya semata-mata sumber daya produksi bagi kegiatan perekonomian sebagai tenaga kerja, tetapi juga merupakan faktor penentu yang signifikan bagi kemajuan dan kemunduran perekonomian suatu negara.²

Potensi lain dari pemuda yang dapat menjadi kebanggaan bangsa adalah kepeloporan pemuda di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Peranan pemuda dalam bidang iptek dapat diwujudkan dalam kepeloporan penemuan dan

¹ Kementerian Pemuda dan Olahraga, Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga 2010-2014, Jakarta, 2010, hal.9-20

² *ibid*, hal. 10.

pemanfaatan Iptek. Kepeloporan Iptek diwujudkan dalam inovasi-inovasi baru di bidang teknologi dan prestasi di bidang ilmu pengetahuan. Melalui kepeloporan Iptek, peran pemuda semakin kokoh sebagai pembaru dan pelopor kemajuan peradaban manusia. Kemajuan suatu bangsa dalam penguasaan Iptek di masa depan akan menjadi salah satu penentu keunggulan bersaing dalam percaturan negara di dunia, disamping kekuatan ekonomi dan militer.³

Di samping itu, terdapat pula potensi pemuda di bidang sosial politik. Potensi besar tersebut terletak pada sifat cenderung pada pembaruan dan perubahan yang dimiliki oleh golongan usia ini. Pemuda merupakan ujung tombak setiap perubahan yang terjadi sepanjang sejarah Indonesia. Tokoh-tokoh pergerakan nasional pada era-era perjuangan meraih kemerdekaan dan mempertahankannya di awal-awal kemerdekaan, sebagian besar tokohnya adalah kaum muda. Era kepemimpinan dan ketokohan pemuda dalam gerakan sosial dan politik di Indonesia era '98 juga dipelopori oleh para pemuda. Dengan demikian, pemuda dalam kategori sosial politik memainkan peran kepeloporan yang relatif signifikan dalam sejarah Bangsa Indonesia.⁴

Selain ketiga potensi pemuda yang disebutkan di atas, dalam Renstra tersebut dikemukakan pula beberapa permasalahan kepemudaan yang dihadapi saat ini beserta tantangan di masa depan. Permasalahan tersebut antara lain di bidang ekonomi yaitu rendahnya produktivitas tenaga kerja yang berusia muda dan tingginya angka pengangguran terbuka. Di bidang iptek, rendahnya angka partisipasi pemuda dalam pendidikan menjadi salah satu faktor penentu rendahnya kualitas pemuda yang pada gilirannya mempengaruhi peran pemuda di bidang iptek. Di bidang sosial, permasalahannya antara lain penyalahgunaan obat-obatan psikotropika dan narkoba; premanisme; serta minimnya sarana dan prasarana kepemudaan juga merupakan faktor yang turut memperbesar masalah kepemudaan. Sedangkan di bidang politik, terdapat dua permasalahan yang dikemukakan antara lain :

1. Persoalan wawasan kebangsaan, bela negara, cinta tanah air merupakan faktor yang perlu terus dipupuk dan ditanamkan di kalangan para pemuda.

³ Kementerian Pemuda dan Olahraga, *op.cit.* hal. 11.

⁴ *Ibid*, hal. 10.

2. Persoalan berupa munculnya orientasi yang berlebihan di kalangan pemuda kepada kegiatan-kegiatan politik praktis seputar kekuasaan dibandingkan kepada kegiatan-kegiatan kepeloporan di bidang keswadayaan dan kesukarelawanan, penumbuhan modal sosial dan pekerja sosial, penumbuhan kreasi seni, budaya, ekonomi kreatif, serta olahraga.”⁵

Permasalahan yang disebutkan pada angka 2 di atas, menjadi sangat penting untuk dikaji lebih mendalam, mengingat bahwa pada masa-masa sebelumnya disebutkan bahwa pemuda dalam kategori sosial politik memainkan peran kepeloporan yang relatif signifikan dalam sejarah Bangsa Indonesia. Artinya, potensi pemuda Indonesia yang pada masa sebelumnya berperan penting melalui peran kepeloporan, kontribusi aktif, serta pengaruh yang signifikan dalam proses perubahan politik nasional, pada saat ini dinilai telah memiliki orientasi yang berlebihan terhadap kekuasaan.

Penilaian yang negatif terhadap orientasi yang berlebihan kepada kekuasaan, tidak terlepas dari nilai yang melekat dalam konsep kekuasaan itu sendiri. Salah satu nilai negatif yang dilekatkan kepada konsep kekuasaan adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Lord Acton dengan istilah “*power tends to corrupt*.”⁶ Adagium tersebut memberikan sebuah pemahaman bahwa siapa pun yang memegang kekuasaan akan cenderung untuk melakukan korupsi atau penyelewengan-penyelewengan.⁷ Hal ini berarti orientasi yang berlebihan terhadap kekuasaan akan cenderung mendorong pelakunya untuk melakukan korupsi atau penyelewengan lainnya, baik pada saat proses meraih kekuasaan maupun pada saat telah memperoleh kekuasaan tersebut.

Apabila kalangan pemuda telah memiliki orientasi yang berlebihan terhadap politik praktis seputar kekuasaan, maka seluruh potensi dari kelompok usia tersebut tentunya akan dikerahkan untuk mengejar kekuasaan yang pada gilirannya-jika merujuk pada istilah Lord Acton di atas-akan rentan dengan penyelewengan dan penyimpangan. Hal ini tentunya sangatlah disayangkan mengingat bahwa potensi pemuda Indonesia begitu besar dan strategis

⁵ Kementerian Pemuda dan Olahraga, *op.cit*, hal. 18.

⁶ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Raja Grafindo Persada. 2006, hal.4

⁷ *ibid*

sebagaimana disebutkan di atas. Terlebih lagi, dalam Renstra Kemenpora belum terdapat penjabaran secara lebih rinci mengenai bagaimana sesungguhnya permasalahan tersebut dapat terjadi, sehingga belum dapat diperoleh solusi yang dapat ditempuh untuk mengatasinya. Oleh karena itu, penelitian secara lebih mendalam terhadap permasalahan tersebut menjadi sangat penting dan relevan.

Pentingnya pendalaman terhadap permasalahan tersebut juga terkait dengan tantangan yang dihadapi oleh generasi muda di masa datang, yang secara eksplisit tercantum dalam Renstra Kemenpora tahun 2010-2014. Dalam Renstra tersebut disebutkan bahwa “Tantangan ke depan dalam pembangunan pemuda adalah peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda yang didukung oleh pendanaan kepemudaan, sarana dan prasarana kepemudaan, penghargaan kepemudaan, serta optimalisasi manajemen organisasi kepemudaan dalam rangka penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, pengembangan kewirausahaan, dan pengembangan kepeloporan pemuda.”⁸ Pengembangan kepeloporan pemuda tersebut tentunya sangat terkait dengan bagaimana kondisi pemuda saat ini, termasuk orientasi politiknya. Hal inilah yang kemudian juga melatarbelakangi peneliti untuk melakukan pendalaman terhadap permasalahan tersebut.

Adanya orientasi di kalangan pemuda yang berlebihan terhadap politik praktis seputar kekuasaan, tentunya menandakan adanya keterlibatan pemuda dalam kegiatan atau proses politik yang terjadi. Salah satu fakta yang terjadi saat ini di kalangan pemuda yang paling menonjol adalah keterlibatan organisasi kepemudaan dalam proses pengkaderan partai politik tertentu, atau dengan kata lain dijadikannya organisasi kepemudaan sebagai basis pengkaderan atau basis massa dari partai politik tertentu. Berdasarkan data Kemenpora tahun 2010, bahwa di antara 114 organisasi kepemudaan yang secara resmi terdaftar, terdapat 23 organisasi yang berafiliasi dengan partai politik tertentu dan bahkan pada perkembangannya menjadi basis pengkaderan partai politik., sebagaimana dikemukakan pada tabel di bawah ini⁹ :

⁸ Kementerian Pemuda dan Olahraga, *op.cit*, hal. 20.

⁹ *Ibid*, hal. 43

Organisasi-organisasi sayap partai tersebut menjadi alat bagi partai politik dalam mengelola keanggotaan atau partisan partai politiknya. Kebanyakan partai politik di Indonesia membentuk organisasi sayap pemuda partai untuk menampung anggota partai yang berusia muda atau menjaring pemuda-pemuda agar bersimpati atau mendukung partainya. Dalam organisasi seperti ini minat dan bakat atau aspirasi kaum muda dapat disalurkan oleh organisasi pemuda sayap partai politik.¹⁰ Beberapa organisasi kepemudaan tersebut disajikan dalam tabel berikut ini¹¹ :

TABEL 1.1
DAFTAR ORGANISASI KEPEMUDAAN YANG BERAFILIASI DENGAN
PARTAI POLITIK

No	Organisasi Kepemudaan	Afiliasi Politik
1	Generasi Muda Demokrat	Partai Demokrat
2	Gema Keadilan	Partai Keadilan Sejahtera
3	Angkatan Muda Ka'bah	Partai Persatuan Pembangunan
4	Gerakan Pemuda Kebangkitan Bangsa	Partai Kebangkitan Bangsa
5	Pemuda Pancasila (PP)	Partai Patriot Pancasila (2004)/Partai Patriot (2009)
6	Satuan Relawan Indonesia Raya	Partai Gerindra
7	Gerakan Muda Nurani Rakyat	Partai Hanura
8	Barisan Muda Pembaruan	Partai Demokrasi Pembaruan
9	Generasi Muda Kasih Bangsa	Partai Demokrasi Kasih Bangsa
10	Angkatan Muda Partai Golkar	Partai Golkar

Jika merujuk pada fakta sejarah mengenai keterlibatan pemuda dalam kegiatan atau proses politik yang terjadi selama ini, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa pemuda Indonesia sebenarnya telah banyak berperan secara positif dalam proses politik nasional. Pemuda banyak memberikan kontribusi aktif dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hal ini

¹⁰ Kementerian Pemuda dan Olahraga, *op.cit*, hal. 27

¹¹ Kementerian Pemuda dan Olahraga, *op.cit*, hal 28

sejalan dengan apa yang disebutkan dalam Renstra Kemenpora, bahwa pemuda dalam kategori sosial politik memainkan peran kepeloporan yang relatif signifikan dalam sejarah Bangsa Indonesia.¹²

Sejarah mencatat bahwa pemuda Indonesia memiliki peran sentral yang menjadi katalis dalam perjuangan bangsa Indonesia. Beberapa tokoh pemuda yang tercatat dalam sejarah Indonesia antara lain dr. Soetomo, Muhammad Yamin, WR. Supratman, Ir. Soekarno, Moh. Hatta, Bung Tomo, Sukarni, Sayuti Melik, Amir Sjarifudin, Chaerul Saleh, Sutan Sahrir, Hariman Siregar, Tan Malaka, dan lain-lain.¹³ Berdirinya organisasi kepemudaan Budi Utomo pada tahun 1908, peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, perjuangan masa revolusi 1945, revolusi 1966, dan reformasi 1998 merupakan sederetan momentum sejarah yang di dalamnya terdapat peran aktif pemuda dalam rangka turut memperjuangkan perubahan.¹⁴ Pada tahun 1908, dr. Sutomo yang pada saat itu baru berusia 20 tahun bersama dengan beberapa rekannya yang berasal dari sekolah kedokteran STOVIA berinisiatif mendirikan organisasi Budi Utomo. Selanjutnya, pada tahun 1928, tepatnya pada tanggal 28 Oktober 1928, lahir Sumpah Pemuda yang merupakan konsensus dari berbagai organisasi kepemudaan yang berawal dari berdirinya Boedi Oetomo. Meskipun eksistensi Boedi Oetomo pada awal berdirinya tidak menasional karena hanya melingkupi Jawa saja, tetapi karena motivasi di kalangan pemuda saat itu begitu kuat mengingat bahwa pada saat itu mereka berada di bawah tekanan kaum kolonial, maka semangat kebersatuan lebih menonjol ketimbang kedaerahan.¹⁵

Selanjutnya, setelah Kongres Pemuda II yang melahirkan Sumpah Pemuda 1928, datang bangsa Jepang yang menjajah Indonesia sejak tahun 1942. Sejak saat itu, isu sentral yang menjadi agenda utama dari para pemuda Indonesia adalah merebut kemerdekaan dari Jepang. Tokoh-tokoh golongan tua yang merupakan alumni Kongres Pemuda II tahun 1928 yang dibantu oleh golongan muda pada saat itu berhasil memproklamkan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945.

¹² Kementerian Pemuda dan Olahraga, *op.cit*, hal. 10.

¹³ <http://www.museumsumpahpemuda.go.id>

¹⁴ Jurnal DEBAT Pemuda, Edisi Pertama, Jakarta, 2009, hal. 2.

¹⁵ Khatibul Umam Wiranu, *Sejarah Konsensus Politik Indonesia : Kajian Filosofis*, Jawa Barat, Saung Buku, 2010, hal. 15.

Setelah berhasil memproklamkan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, sejarah kemudian mencatat bahwa kelompok pemuda terus memberikan kontribusi positif dalam proses penyelenggaraan pemerintahan pasca kemerdekaan. Peran tersebut antara lain pada tahun 1966 pada masa pemberontakan dan penumpasan G 30 S/PKI, tahun 1974 yang ditandai dengan peristiwa Malari, dan tahun 1998 yang merupakan akhir dari kekuasaan rezim Orde Baru pimpinan Soeharto.¹⁶

Rentetan catatan sejarah mengenai peran aktif pemuda dalam proses perubahan politik nasional di atas, sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ben Anderson pada tahun 1972, yang menyebutkan bahwa peranan inti pada awal pecahnya revolusi di Indonesia diambil bukan oleh para cendekiawan yang tersingkir, bukan juga terutama oleh kelas-kelas tertindas, melainkan oleh kaum muda, atau sebagaimana yang oleh orang Indonesia disebut sebagai *pemuda*.¹⁷ Hal tersebut tentunya merupakan sebuah kewajaran karena pemuda memiliki karakteristik yang khas yang potensinya mampu membuahkan sebuah pembaruan, sebagaimana disebutkan oleh Karl Mannheim dalam sebuah penelitian tentang pemuda. Penelitian yang dilakukan pada tahun 1957 itu menyebutkan bahwa kaum muda dengan karakteristiknya yang khas, merupakan kekuatan tersembunyi sebagai agen pembaharuan (*revitalizing agent*) dalam setiap masyarakat. Pandangan politik setiap generasi muda kapan pun yang memiliki karakteristik khas sebagai agen pembaharuan, dipengaruhi dari kondisi politik nasional pada saat kesadaran politik mereka mulai tumbuh.¹⁸

Peran aktif pemuda, khususnya dalam sejarah politik nasional sebagaimana disebutkan di atas, tentunya menarik apabila dikaitkan dengan orientasi politik pemuda yang berlebihan terhadap politik praktis seputar kekuasaan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Benang merah yang

¹⁶ Khatibul Umam Wiranu, *op.cit.* Lihat juga di Ricardi S. Adnan dan Arwab Pradiansyah, "Bab III: Gerakan Mahasiswa untuk Reformasi," Kisah Perjuangan Reformasi, Selo Soemardjan (ed.), (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1999)

¹⁷ Benedict Anderson, *Java in Time of Revolution : Occupation and Resostence 1944-1946*, edisi Indonesia. *Revolusi Pemuda : Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946*, 1988, hal. 15 dalam Jimmy Palapa, *Pendidikan Politik di Kalangan Generasi Muda*, Jakarta, FISIP UI, 1987, hal. 4.

¹⁸ Karl Mannheim, *Diagnosis of Our Time : Wartime Essay of a Sociologist*, 1950, hal. 34, dalam Jimmy Palapa, *op.cit.*, hal. 3.

merupakan irisan dari kedua fenomena tersebut adalah adanya keterlibatan kalangan pemuda dalam kegiatan atau aktivitas politik yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, untuk melakukan pendalaman atau penelitian lebih mendalam terhadap permasalahan berupa adanya orientasi politik pemuda seperti tersebut di atas, maka penelitian dapat dilakukan terhadap bagaimana keterlibatan kalangan pemuda yang terhimpun dalam organisasi kepemudaan dalam kegiatan atau aktivitas politik yang sedang berlangsung khususnya pada masa reformasi pasca runtuhnya era pemerintahan Orde Baru tahun 1998.

Akan tetapi, mengingat bahwa aspek yang terdapat dalam kegiatan ataupun aktifitas politik tersebut sangat luas, maka peneliti melakukan pembatasan penelitian dengan merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan penelitian tersebut di atas. Sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 17 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan yang menyebutkan bahwa "Peran aktif pemuda sebagai agen perubahan diwujudkan dengan mengembangkan pendidikan politik dan demokratisasi." Ketentuan tersebut tentunya memberikan sebuah indikasi bahwa salah satu kegiatan atau aktifitas politik yang dapat dilakukan oleh pemuda, khususnya dalam rangka menjalankan perannya sebagai agen perubahan dan tentunya menjalankan amanah undang-undang, adalah dengan cara mengembangkan pendidikan politik.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka cakupan kegiatan atau aktivitas politik dari kalangan pemuda yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah seputar peran dalam pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh kalangan pemuda yang terhimpun dalam organisasi kepemudaan. Dengan demikian, penelitian ini akan terfokus kepada penelitian terhadap pelaksanaan peran organisasi kepemudaan dalam melaksanakan pendidikan politik di Indonesia saat ini, yang kemudian dituangkan dalam tema penelitian "Analisis Peran Organisasi Kepemudaan Dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik di Indonesia".

Secara konseptual, peran menurut Levinson sebagaimana dikutip oleh Soejono Soekanto, adalah suatu konsep prihal apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat, yang meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, yang

juga dapat ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.¹⁹ Senada dengan Levinson, Margono Slamet menyebutkan bahwa peranan adalah suatu perilaku yang dilaksanakan seseorang yang menempati suatu posisi dalam masyarakat.²⁰

Peran juga merujuk kepada apa yang diharapkan dari seseorang atau kelompok yang ada dalam masyarakat untuk melaksanakan sesuatu dan bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Penekanan dari definisi tersebut adalah bahwa peran tidak saja merupakan sesuatu yang dilakukan, tetapi juga merupakan sesuatu yang diharapkan untuk dilakukan. Konsep demikian diutarakan oleh Biddle dan Thomas, sebagaimana yang dikutip oleh Soejono Soeanto, bahwa peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Misalnya dalam keluarga, perilaku ibu dalam keluarga diharapkan bisa memberi anjuran, memberi penilaian, memberi sanksi dan lain-lain.²¹ Definisi yang sama juga dinyatakan oleh Aivin L. Bertrand, yang menyebutkan bahwa peran adalah pola tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang memegang status atau kedudukan tertentu.²²

Berdasarkan beberapa definisi umum mengenai peran tersebut di atas, maka pengertian peran dapat dibagi menjadi dua definisi, yakni definisi pertama merujuk pada apa yang selama ini telah dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam melaksanakan sesuatu yang telah direncanakannya. organisasi kepemudaan dalam melaksanakan pendidikan politik di Indonesia. Sedangkan definisi kedua adalah merujuk kepada apa yang diharapkan terhadap seseorang atau sekelompok orang dalam melakukan sesuatu yang telah direncanakannya. Selanjutnya, kedua definisi umum di atas akan menjadi dasar dalam perumusan masalah dan pertanyaan penelitian berikut ini.

¹⁹ Soejono Soekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press:1982, hal. 238

²⁰ Margono Slamet, *Mahasiswa Dalam Pembangunan*, Badan Penerbit Universitas Lampung, Lampung : 1985, hal. 15

²¹ Soejono Soekamto, *op.cit*, hal. 238

²² Soleman B. Taneko, *Konsepsi Sistem Sosial dan Sistem Sosial Indonesia*, CV. Fajar Agung, Jakarta : 1986, hal. 23

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini tertuang dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- a. Bagaimana peran organisasi kepemudaan dalam melaksanakan pendidikan politik di Indonesia pada masa reformasi sejak runtuhnya pemerintahan Orde Baru tahun 1998 ?
- b. Bagaimana harapan stakeholder terhadap organisasi kepemudaan dalam rangka pelaksanaan pendidikan politik di Indonesia ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran secara umum mengenai pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh organisasi kepemudaan di Indonesia. Adapun tujuan turunan dari tujuan tersebut adalah :

- a. Untuk mengetahui peran organisasi kepemudaan dalam melaksanakan pendidikan politik di Indonesia pada masa reformasi sejak runtuhnya pemerintahan Orde Baru tahun 1998.
- b. Untuk mengetahui harapan stakeholder terhadap organisasi kepemudaan dalam rangka pelaksanaan pendidikan politik di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

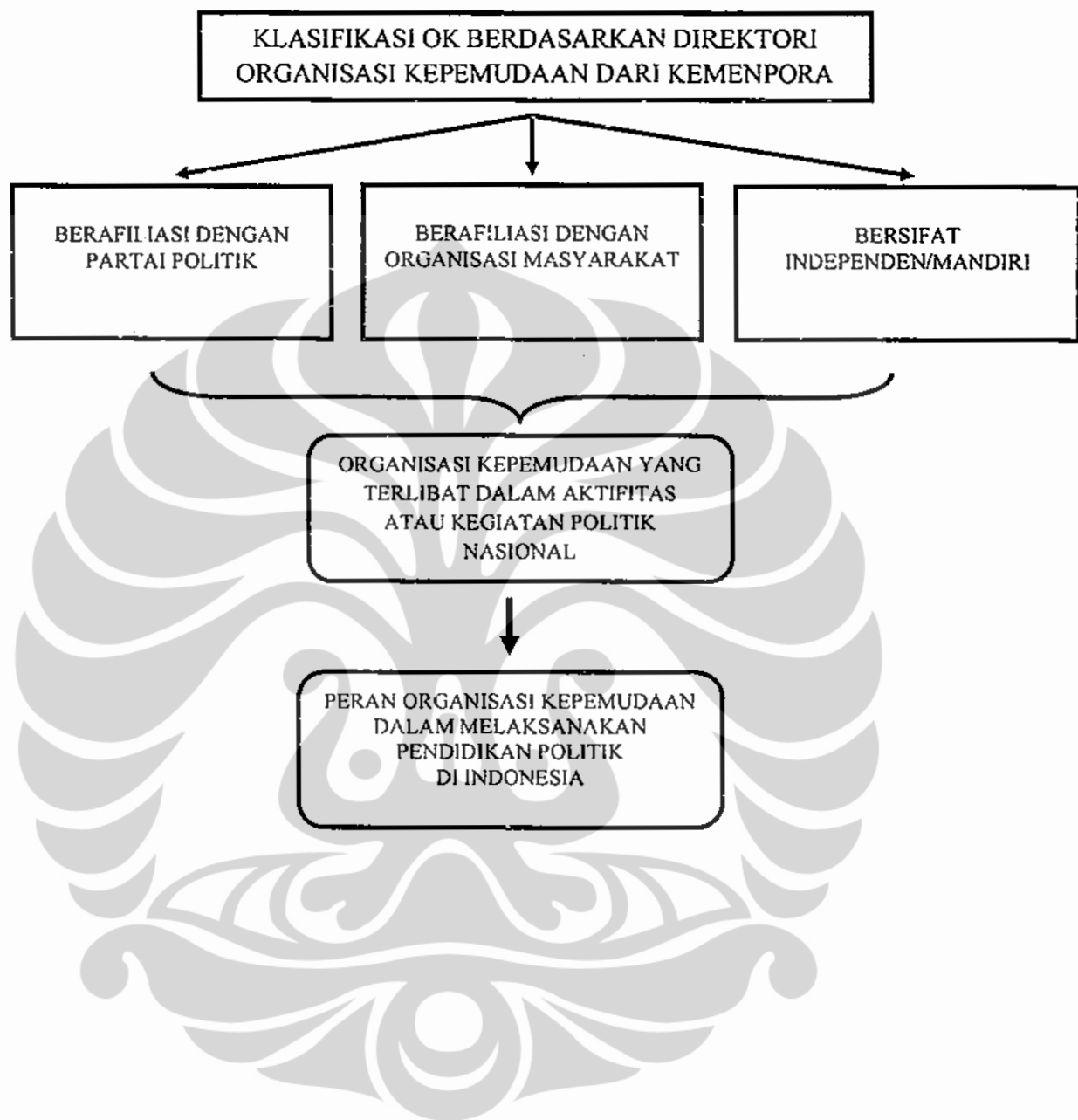
- a. Secara teoritis, dapat menambah dan memberikan kontribusi secara akademis terkait dengan studi mengenai kepemudaan dan peran aktifnya dalam proses pengembangan pendidikan politik di Indonesia.
- b. Secara praktis, dapat menjadi referensi bagi Kemenpora dalam memahami keterlibatan OKP dalam proses politik nasional saat ini dan dalam hal penjabaran Undang-Undang Kepemudaan dalam bentuk yang lebih teknis berupa peraturan pemerintah.

1.5. Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah organisasi kepemudaan. Mengingat bahwa organisasi kepemudaan yang terdaftar secara resmi di Kemenpora sampai dengan akhir tahun 2010 mencapai 114 organisasi,

maka peneliti akan memilih beberapa organisasi yang menurut peneliti dapat merepresentasikan jenis-jenis organisasi pemuda yang ada saat ini, yang terbagi menjadi tiga jenis, yaitu organisasi kepemudaan yang merupakan sayap partai politik, organisasi kepemudaan sayap organisasi masyarakat (ormas), dan organisasi independen. Organisasi kepemudaan yang peneliti maksud sebagai representasi ketiga jenis organisasi kepemudaan di atas adalah Generasi Muda Demokrat Indonesia (GMDI), Angkatan Muda Demokrat Indonesia (AMDI), dan Barisan Muda Pembaharuan (BMP) sebagai representasi jenis yang pertama; kemudian Pemuda Muhammadiyah sebagai representasi jenis yang kedua; dan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan Gerakan Pemuda Islam (GPI) sebagai representasi jenis yang ketiga. Penelitian ini juga dibatasi oleh periodisasi dari kepemimpinan organisasi kepemudaan tersebut, yakni masa kepemimpinan organisasi kepemudaan yang aktif saat ini dan terdaftar secara resmi di Kementerian Pemuda dan Olahraga pada Kabinet Indonesia Bersatu II (2009-2014).

1.6. Model Operasional Penelitian



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penelitian ini, beberapa konsep yang digunakan tentunya merupakan konsep-konsep yang relevan dengan tema dan permasalahan penelitian. Oleh karena itu, pemilihan beberapa konsep yang digunakan didasarkan kepada tema dan permasalahan penelitian ini. Jika merujuk pada tema penelitian “Analisis Peran Organisasi Kepemudaan Dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik di Indonesia”, maka konsep yang akan digunakan adalah konsep organisasi dan konsep pendidikan politik. Dalam uraian mengenai beberapa konsep tersebut di atas, tidak menutup kemungkinan akan diuraikan pula konsep tambahan yang dimungkinkan berasal dari turunan dari konsep-konsep utama tersebut. Oleh karena itu, berikut ini akan diuraikan mengenai beberapa konsep yang telah tersebut di atas.

2.1. Konsep Peran

Peran menurut Levinson sebagaimana dikutip oleh Soejono Soekamto, adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat, yang meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, yang juga dapat ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.²³ Senada dengan Levinson, Margono Slamet menyebutkan bahwa peranan adalah suatu perilaku yang dilaksanakan seseorang yang menempati suatu posisi dalam masyarakat.²⁴

Peran juga merujuk kepada apa yang diharapkan dari seseorang atau kelompok yang ada dalam masyarakat untuk melaksanakan sesuatu dan bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Penekanan dari definisi tersebut adalah bahwa peran tidak saja merupakan sesuatu yang dilakukan, tetapi juga merupakan sesuatu yang diharapkan untuk dilakukan. Konsep demikian diutarakan oleh Biddle dan Thomas, sebagaimana yang dikutip oleh Soejono Soeanto, bahwa

²³ Soejono Soekamto, *op.cit*, hal. 238

²⁴ Margono Slamet, *op.cit*, hal. 15

peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Misalnya dalam keluarga, perilaku ibu dalam keluarga diharapkan bisa memberi anjuran, memberi penilaian, memberi sangsi dan lain-lain.²⁵ Definisi yang sama juga dinyatakan oleh Alvin L. Bertrand, yang menyebutkan bahwa peran adalah pola tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang memegang status atau kedudukan tertentu.²⁶

Dalam konteks penelitian ini, keempat definisi umum mengenai peran tersebut di atas akan digunakan dalam rangka melakukan pembahasan untuk menjawab dua pertanyaan dalam penelitian ini. Definisi pertama dan kedua akan digunakan dalam pembahasan pertanyaan penelitian yang pertama, yakni bahwa peran organisasi kepemudaan dalam pengembangan pendidikan politik di Indonesia akan merujuk pada apa yang selama ini telah dilakukan oleh organisasi kepemudaan dalam melaksanakan pendidikan politik di Indonesia. Sedangkan definisi ketiga dan keempat, akan digunakan dalam pembahasan pertanyaan penelitian yang kedua, yakni apa yang diharapkan terhadap organisasi kepemudaan dalam hal pelaksanaan pengembangan pendidikan politik di Indonesia.

2.2. Konsep Organisasi

Pengertian organisasi telah banyak dikemukakan oleh para ahli. Dalam penelitian ini, akan disebutkan beberapa pengertian mengenai organisasi tersebut, antara lain :

1. James D. Mooney (1974)²⁷ :

“Organization is the form of every human association for the attainment of common purpose.”

(Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk pencapaian suatu tujuan bersama).

²⁵ Soejono Soekamto, *op.cit*, hal. 238

²⁶ Soleman B. Taneko, *op.cit*, hal. 23

²⁷ James D. Mooney, *The Principles of Organization*, revised, 1974, p.1, dikutip dari Sutarto, *Dasar-Dasar Organisasi*, Yogyakarta: UGM Press:1983, hal. 23.

2. J. William Schulze (1949)²⁸ :

"An Organization is a combination of the necessary human beings, materials, tools, equipment, working space and appurtenances, brought together in systematic and effective correlation, to accomplish some desired object."

(Organisasi adalah penggabungan dari orang-orang, benda-benda, alat-alat perlengkapan, ruang kerja dan segala sesuatu yang bertalian dengannya, yang dihimpun dalam hubungan yang teratur dan efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan).

3. William G. Scott (1962)²⁹ :

"A formal Organization is a sistem of coordinated activities of a group of people working cooperatively toward a common goal under authority and leadership."

(Suatu organisasi formal adalah suatu sistem mengenai aktivitas-aktivitas yang dikoordinasikan dari sekelompok orang yang bekerja sama ke arah suatu tujuan bersama di bawah wewenang dan kepemimpinan).

4. J. H. Vesting, I. V. Fine and Gary J. Zent (1976)³⁰ :

"Organization is needed when people are joint trying to reach some common goals."

(Organisasi diperlukan apabila orang-orang bergabung berusaha mencapai beberapa tujuan bersama).

Dari keempat definisi organisasi di atas, maka dapat disebutkan bahwa dalam sebuah organisasi, terdapat paling sedikit tiga hal, yakni :

1. Sejumlah orang (lebih dari satu), yang kemudian menjadi anggota organisasi.
2. Aktivitas organisasi yang dilaksanakan dengan prinsip kerja sama.
3. Tujuan organisasi yang disepakati bersama.

²⁸ J. William Schulze, "Some definition", sebagaimana dikutip dalam buku Albert Lepawsky, (ed.), *Administration : The Art and Science of Organization and Management*, 1949, p.36, dikutip dari Sutarto, *Dasar-Dasar Organisasi*, Yogyakarta, UGM Press: 1983, hal. 23.

²⁹ William G. Scott, *Human Relation in Management : A Behavioral Science Approach*, 1962, p.110, dikutip dari Sutarto, *Dasar-Dasar Organisasi*, Yogyakarta, UGM Press: 1983, hal. 32.

³⁰ J. H. Vesting, I. V. Fine and Gary J. Zent, *Purchasing in Management : Materials in Motion*, 1976, p.27 dikutip dari Sutarto, *Dasar-Dasar Organisasi*, Yogyakarta, UGM Press: 1983, hal. 37.

2.3. Pendidikan Politik

Istilah pendidikan politik merupakan salah satu istilah yang penting dalam studi ilmu politik. Istilah tersebut jarang didefinisikan secara baku oleh ilmuwan politik. Meskipun demikian, istilah tersebut seringkali dikaitkan dengan definisi dari politik itu sendiri. Guru Besar Ilmu Politik UI Miriam Budiardjo, mendefinisikan politik sebagai berikut³¹ :

“politik merupakan berbagai macam kegiatan yang terjadi di suatu negara, yang menyangkut proses menentukan tujuan dan bagaimana cara mencapai tujuan itu. Lebih lanjut Miriam Budiardjo mengartikan politik sebagai tindakan yang beraneka ragam yang dilakukan oleh penguasa maupun masyarakat yang berkaitan dengan proses menetapkan tujuan dan bagaimana cara pencapaian tujuan itu.”

Dalam konteks pengertian politik di atas, maka pendidikan politik dikategorikan sebagai salah satu dari *berbagai macam kegiatan atau tindakan yang beraneka ragam* yang disebutkan dalam definisi di atas.

Dalam ranah teori politik klasik, Machiavelli menyatakan bahwa pendidikan politik perlu diberikan kepada orang-orang “yang belum tahu”. Pendidikan politik tersebut dimaknai bukan sebagai pendidikan politik yang negatif tentang pembenci tiran, melainkan pendidikan positif, yaitu diberikan pada orang-orang yang mengakui pentingnya pendidikan tersebut, sekalipun pendidikan tersebut merupakan alat tirani yang mengejar suatu keuntungan tertentu.³²

Ryas Rasyid dalam bukunya menyebutkan bahwa bahwa pendidikan politik adalah proses untuk membentuk persepsi dan orientasi orang terhadap sistem politiknya, merupakan sarana yang dapat digunakan untuk membangun budaya politik yang baru. Karena kehidupan politik adalah suatu kondisi yang dinamik, maka proses pembentukan persepsi dan orientasi itu seyogyanya terus

³¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, edisi revisi, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2010, hal. 15.

³² Antonio Gramsci, *Catatan-Catatan Politik*, Pustaka Prometheus, Surabaya: 2001, hal. 17.

bergerak sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat dalam suatu lingkungan sistem politik.³³

Menurut Mansour Fakih, pendidikan politik adalah setiap usaha untuk melahirkan kesadaran kritis bagi penghormatan atas hak asasi manusia, termasuk hak perempuan, hak anak-anak, hak cultural dan politik kaum minoritas, hak-hak penyandang cacat, dan hak asasi manusia lainnya. Ia juga menyebutkan bahwa untuk membangun system politik yang demokratis hanya bisa diwujudkan oleh suatu system pendidikan politik kritis.³⁴

Rusadi Kantaprawira menyatakan bahwa pendidikan merupakan salah satu fungsi dari struktur politik di dalam masyarakat. Dengan menyamaratakan pendidikan politik dengan sosialisasi politik, Kantaprawira mendefinisikan pendidikan politik sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat, dan akhirnya rakyat dapat berpartisipasi secara maksimal dalam system politik tersebut. Pendidikan politik tersebut dapat diselenggarakan melalui³⁵ :

1. Bahan-bahan yang dapat dibaca (readable, legible) seperti surat kabar, majalah, dan lain-lain yang bersifat publikasi massa dan yang bisa membentuk pendapat umum,
2. Siaran yang dapat didengar (audible) dan televise serta film yang dapat dilihat dan didengar (bersifat audio-visual),
3. Lembaga-lembaga, asosiasi-asosiasi dalam masyarakat seperti masjid dan gereja yang menjampaikan khitbah, serta kemungkinan juga melalui pendidikan formil ataupun informal.

Almond dan Coleman, seperti dikutip oleh Rusadi menulis soal fungsi pendidikan politik dalam struktur politik, bahwa "yang ada dalam setiap system politik adalah metode-metode perekrutan dan latihan politik yang menyebabkan kita bertanya, bagaimanakah rakyat direkrut dan dimasyarakatkan ke arah

³³Ryas Rasyid, *Nasionalisme dan Demokrasi Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta: 1999. Hal 72

³⁴Mansour Fakih, *Pendidikan politik untuk rakyat*, Penerbit INSIST, Yogyakarta: 1999, hal 5

³⁵Dr.H.Rusadi Kantaprawira,SH., *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar*, Cetakan Kelima (Cetakan Pertama 1977), CV. Sinar Baru, Bandung: 1988, hal. 54

peranan-peranan dan orientasi-orientasi politik dalam system politik yang berbeda-beda, atau fungsi perekrutan dan sosialisasi.³⁶

Beberapa ahli banyak yang mengaitkan antara pendidikan politik dengan sosialisasi politik. Menurut Gabriel Almond, pendidikan politik adalah bagian dari sosialisasi politik yang khusus membentuk nilai-nilai politik, yang menunjukkan bagaimana seharusnya masing-masing masyarakat berpartisipasi dalam sistem politiknya. Kebanyakan orang yang dimasa kanak-kanaknya belajar memahami sikap-sikap dan harapan-harapan politik yang hidup dalam masyarakatnya.³⁷

Alfian, dalam kumpulan karangannya juga erat mengaitkan pengertian pendidikan politik dengan sosialisasi politik. Beliau berpendapat bahwa sosialisasi politik atau pendidikan politik dalam arti kata longgar adalah bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari entah itu disenangi atau tidak, dan disadari atau tidak. Hal ini dialami oleh anggota-anggota masyarakat baik penguasa atau masyarakat umum, suasananya menjadi berubah kalau ada usaha untuk mengubah sosialisasi itu, umpamanya dengan memasukkan nilai-nilai politik baru yang ideal.³⁸ Dalam bukunya yang lain, Alfian menyebutkan bahwa pendidikan politik dalam arti yang ketat sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul-betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal dan hendak dibangun.³⁹

Lebih lanjut Dannis Kavang membagi proses sosialisasi atau pendidikan politik tersebut menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu yang bersifat laten yakni yang berlangsung dalam institusi-institusi non politis seperti lingkungan keluarga, lingkungan kerja dan lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua adalah yang berlangsung dalam lembaga politis tertentu yang memang dimaksudkan untuk mempengaruhi sikap dan prilaku masyarakat.⁴⁰

³⁶ Dr.H.Rusadi Kantaprawira,SH, op.cit, hal. 56

³⁷ Muchtar Mas'oe'd dan Collin ac Andrews, *Perbandingan Sistem Politik*, Gadjah Mada University Press. Yogyakarta: 1986, hal 32

³⁸ Alfian. *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta: 2000, hal. 32

³⁹ Alfian, *Masalah dan Prospek Pembangunan Politik di Indonesia*, Jakarta, Penerbit Gramedia, 1986, hal. 245.

⁴⁰ Dannis Kavang, *Political Culture*, Armico, Bandung: 1998, hal. 45.

Dalam penelitiannya mengenai pendidikan politik pada generasi muda, Jimmy Palapa menyebutkan bahwa masalah-masalah yang terkandung dan terkait pada pendidikan politik adalah antara lain : kebudayaan, kelakuan, kekuasaan, kepemimpinan, kecerdasan, kedewasaan, dan kebijaksanaan politik. Sesuai dengan sifatnya masing-masing, masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi dan diuraikan kembali dalam konsep sosialisasi politik, kaderisasi/rekrutmen politik, dan partisipasi politik.⁴¹ Hasil penelitian Jimmy Palapa tersebut selaras dengan berbagai pengertian terhadap pendidikan politik di atas, yang mengaitkan antara pendidikan politik dengan sosialisasi politik, kaderisasi politik, dan partisipasi politik.

Dari berbagai definisi pendidikan politik di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pendidikan politik merupakan sarana dalam melakukan transformasi pengetahuan dan nilai-nilai politik ideal dan yang hendak dibangun, yang dapat dilakukan oleh berbagai institusi politik yang ada, agar nantinya masyarakat mengetahui hak-hak politiknya dan dapat berpartisipasi aktif secara maksimal dalam sistem politik di negaranya. Kegiatan pendidikan politik tersebut dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kaderisasi politik, sosialisasi politik, yang kemudian akan bermuara pada bentuk partisipasi politik.

Dengan demikian, pembahasan mengenai pelaksanaan pendidikan politik dapat diuraikan menjadi pembahasan mengenai pelaksanaan sosialisasi politik, kaderisasi politik, dan partisipasi politik. Oleh karena itu, perlu untuk kemudian diuraikan terlebih dahulu definisi dari ketiga aspek tersebut.

2.3.1. Kaderisasi Politik

Rekrutmen atau kaderisasi politik adalah seleksi dan pemilihan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya.⁴² Pendidikan politik, dalam kaitannya dengan kaderisasi politik, merupakan sarana pembentukan kader yang akan mengisi struktur politik, menggerakkan proses

⁴¹ Jimmy Palapa, *op.cit.*, hal. 15.

⁴² Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, edisi revisi, Jakarta, Grasindo, 2010, hal. 150

politik, dan menjalankan fungsi politik untuk mewujudkan tujuan politik.⁴³ Kader politik tersebut biasanya atau umumnya terdiri dari sejumlah generasi muda yang dididik oleh generasi di atasnya agar kelak mampu menjalankan sistem politik termasuk kepemimpinan dan kekuasaan politik.⁴⁴

Rekrutmen atau kaderisasi politik juga merupakan salah satu fungsi partai politik khususnya di negara yang sedang menjalani masa transisi demokrasi seperti Indonesia. Fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai politik maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai politik butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan diri. Dengan mempunyai kader-kader yang baik, partai politik tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional.⁴⁵ Fungsi ini semakin besar porsinya manakala partai politik tersebut merupakan partai tunggal seperti dalam sistem politik totaliter, atau manakala partai tersebut merupakan partai mayoritas dalam badan perwakilan rakyat sehingga berwenang membentuk pemerintahan dalam sistem politik demokrasi.⁴⁶

Selain untuk tingkatan seperti tersebut di atas, partai politik juga berkepentingan untuk memperluas atau memperbanyak keanggotaan. Maka ia pun berusaha menarik sebanyak-banyaknya orang untuk menjadi anggotanya. Dengan didirikannya organisasi-organisasi massa (*sebagai underbow*), yang melibatkan golongan-golongan buruh, petani, pemuda, mahasiswa, wanita, dan sebagainya, maka kesempatan untuk berpartisipasi diperluas. Bagi partai politik, rekrutmen politik akan menjamin kontinuitas dan kelestarian partai politik tersebut, sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin.⁴⁷ Dengan demikian, fungsi rekrutmen politik sangat penting bagi kelangsungan sistem politik dan partai politik yang menjalankan fungsi tersebut, sebab tanpa ada

⁴³ Jimmy Palapa, *op.cit*, hal.54.

⁴⁴ *Ibid*, hal. 55.

⁴⁵ Miriam Budiardjo, *op.cit*, hal. 408.

⁴⁶ Ramlan Surbakti, *op.cit*, hal. 151.

⁴⁷ Miriam Budiardjo, *op.cit*, hal. 408.

regenerasi politik yang berupa elit politik muda, kelangsungan hidup sistem politik dan partai politik tersebut akan terancam.⁴⁸

2.3.2. Sosialisasi Politik

Dalam ilmu politik, sosialisasi politik diartikan sebagai suatu proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana ia berada. Konsep tersebut merupakan bagian dari proses yang menentukan sikap politik seseorang, misalnya mengenai nasionalisme, kelas sosial, suku bangsa, ideologi politik, hak dan kewajiban.⁴⁹

Suatu definisi yang dirumuskan oleh seorang ahli sosiologi politik M. Rush :

Sosialisasi politik adalah proses yang melaluinya orang dalam masyarakat tertentu belajar mengenali sistem politiknya. Proses ini sedikit banyak menentukan persepsi dan reaksi mereka terhadap fenomena politik (*Political Socialization may be defined is the process by which individuals in a given society become acquainted with the political sistem and which to a certain degree determines their perceptions and their reactions to political phenomena*).⁵⁰

2.3.3. Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan, yang mana kebijakan atau keputusan tersebut menyangkut atau mempengaruhi kehidupannya.⁵¹ Kegiatan yang dimaksud antara lain mengajukan tuntutan, membayar pajak, melaksanakan keputusan, mengajukan kritik dan koreksi atas pelaksanaan kebijakan umum, dan mendukung atau menentang calon pemimpin tertentu, mengajukan alternatif pemimpin, dan memilih wakil rakyat dalam pemilihan umum.⁵² Miriam Budiardjo

⁴⁸ Ramlan Surbakti, *op.cit*, hal. 151.

⁴⁹ Miriam Budiardjo, *op.cit*, hal. 407.

⁵⁰ M. Rush, *Politics and Society : An Introduction to Political Sociology*, 1992, p.92 dikutip dari Miriam Budiardjo, *op.cit*, hal. 407.

⁵¹ Ramlan Surbakti, *op.cit*, hal. 180.

⁵² *Ibid*, hal. 151.

menyebutkan definisi umum partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*publik policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct actionnya*, dan sebagainya. Definisi umum yang dikemukakan oleh Miriam Budiardjo tersebut sejalan dengan pendapat beberapa sarjana yang memelopori studi partisipasi politik antara lain :

1. Herbert McClosky, yang menyebutkan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum (*The political participation will refer to those voluntary activities by which members of a society share in the selection of rulers and, directly or indirectly, in the formation of publik policy*).⁵³
2. Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson mengemukakan pengertian partisipasi politik khususnya di negara-negara berkembang, yakni kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif (*By political participation we mean activity by private citizens designed to influence government decision making. Participation may be individual or collective, organized or spontaneous, sustained or sporadic, peaceful or violent, legal or illegal, effective or ineffective*).⁵⁴

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapatlah disimpulkan bahwa dalam partisipasi politik setidaknya mengandung tiga hal, antara lain :

⁵³ Herbert McClosky, "Political Participation", *International Encyclopedia of The Social Sciences*, 1972, p. 252 dikutip dari Miriam Budiardjo, hal. 367.

⁵⁴ Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, *No Easy Choice : Political Participation in Developing Countries*, 1977, p.3, dikutip dari Miriam Budiardjo, *op.cit*, hal. 368.

1. Adanya aktivitas/kegiatan politik,
2. Adanya pelaksana aktivitas, yang dapat bersifat individu maupun kelompok,
3. Adanya tujuan aktivitas yakni mempengaruhi kebijakan umum,
4. Miriam Budiardjo mengaitkan partisipasi politik dengan satu hal, yakni adanya kesadaran politik yang dimiliki oleh masyarakat yang mendasari munculnya aktivitas politik tersebut. Ditambahkan pula oleh Ramlan Surbakti, bahwa kesadaran politik tersebut adalah kesadaran akan hak dan kewajiban politik sebagai warga negara.⁵⁵

Pada perkembangannya, partisipasi politik yang sebelumnya sangat identik atau seolah-olah hanya dapat dilakukan melalui partai politik saja, kemudian meluas dalam bentuk partisipasi lain, yakni melalui kelompok-kelompok. Di negara berkembang seperti Indonesia, seiring dengan berakhirnya masa represif yang dipraktikkan oleh Orde Baru, jaringan pendidikan yang semakin luas dan meningkatnya komunikasi massa kemudian menggerakkan banyak kelompok yang tadinya apatis untuk aktif dalam berbagai proses politik, melalui kegiatan bermacam-macam organisasi seperti serikat buruh, organisasi petani, organisasi perempuan, organisasi pemuda, partai politik, dan sebagainya.⁵⁶ Kelompok-kelompok ini tergugah kesadaran sosial dan politiknya, sehingga terjadi peningkatan tuntutan terhadap pemerintah yang sangat mencolok.⁵⁷

Kelompok-kelompok tersebut kemudian berkembang menjadi gerakan sosial (*sosial movement*). T. Tarrow dalam bukunya *Power in Movement* berpendapat bahwa :

Sosial movement adalah tantangan kolektif oleh orang-orang yang mempunyai tujuan bersama berbasis solidaritas, (yang dilaksanakan) melalui interaksi secara terus menerus dengan para elit, lawan-lawannya, dan pejabat-pejabat (*Sosial movements are collective challenges by people with common purposes and solidarity in sustained interaction with elites, opponents and authorities*).⁵⁸

Di samping itu terdapat pula definisi mengenai kelompok kepentingan, yakni suatu organisasi yang berusaha untuk mempengaruhi kebijakan publik

⁵⁵ Ramlan Surbakti, *op.cit*, hal. 184.

⁵⁶ Miriam Budiardjo, *op.cit*, hal.381.

⁵⁷ Ibid

⁵⁸ Seperti disebut oleh Rod Hague et al, *Comparative Government and Politics*, p.91, dikutip dari Miriam Budiardjo, *op.cit*, hal. 383.

dalam suatu bidang yang penting untuk anggota-anggotanya (*an organization that attempts to influence publik policy in a specific area of importance to its members*).⁵⁹ Larana, Johnston, dan Gustfild menyebutkan bahwa salah satu cirri kelompok kepentingan adalah bersifat lintas kelas sosial, dengan latar belakang status sosial yang tersebar seperti golongan muda, gender, atau mereka yang mempunyai perbedaan orientasi seksualitas (gay atau lesbian).⁶⁰

2.4. Teori Harapan

Dalam kamus psikologi *expectancy* (pengharapan) diartikan sebagai “kecondongan yang dipelajari dimana suatu organisme dapat memperkirakan bahwa situasi tertentu akan timbul dengan member respons terhadap suatu stimulus” (Kartono, 1987:160). Menurut Riggio (1990:172) adalah “*Expectancy is the perceived relationship between the individual's effort and performance of the behavior*”. Ekspektansi adalah hubungan yang dirasakan individu antara usaha dan kenyataan yang ada.

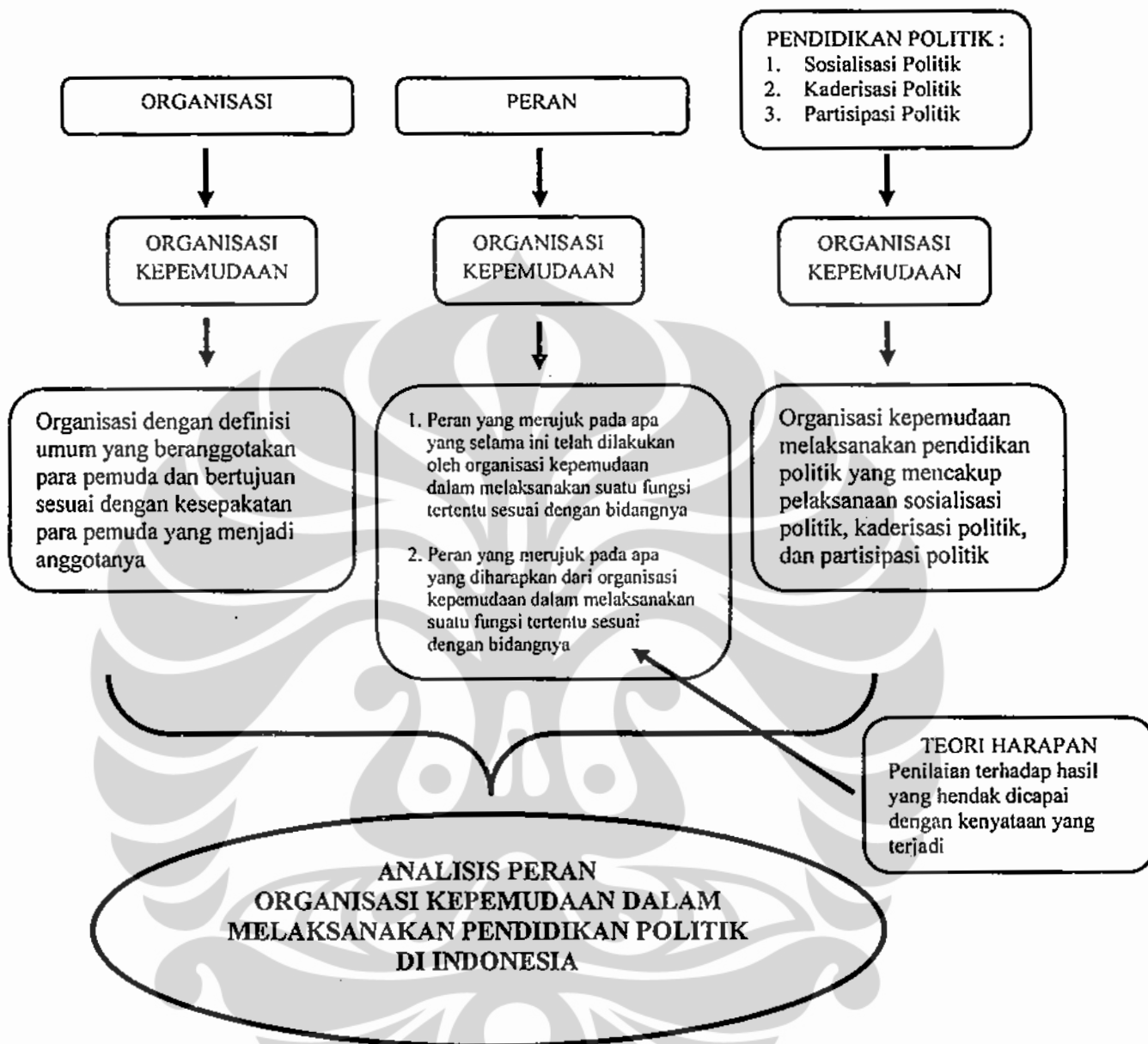
Teori nilai harapan (*ExpectancyValue Theory*) dalam kamus psikologi diartikan sebagai “suatu teori mengenai motivasi manusia, yang menjelaskan tingkah laku manusia dipandang dari segi norma norma harapan individu dalam pencapaian suatu sasaran, dalam satu situasi dimana motif motifnya dapat dibangkitkan, serta berkenaan dengan nilai insentif dari sasaran tersebut” (Kartono, 1987:160).

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ekspektansi/harapan adalah perkiraan individu yang muncul dari hubungan antara usaha dan hasil yang hendak dicapai, dimana hasil dari usaha tersebut mempunyai nilai tersendiri bagi individu tersebut.

⁵⁹ Marcus Ethridge dan Howard Handelman, *Politics in a Changing Society : A Comparative Introduction to Political Science*, 1994, p. 150, dikutip dari Miriam Budiardjo, *op.cit*, hal. 383.

⁶⁰ Enrique Larana, Hank Johnston, dan Joseph R. Gustfild, *New Social Movement : From Ideology to Identity*, 1994, p.6-9, dikutip dari Miriam Buadiardjo, *op.cit*, hal. 385.

2.5. Operasionalisasi Konsep



BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan rumusan pertanyaan penelitian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang akan menempatkan pandangan peneliti terhadap sesuatu yang diteliti secara subyektif, dalam arti peneliti sangat menghargai dan memperhatikan pandangan subyektif setiap subjek yang ditelitinya, dalam hal ini para anggota organisasi kepemudaan yang menjadi subjek penelitian. Sebagaimana dikemukakan oleh Creswell, bahwa pendekatan kualitatif selalu berusaha memahami pemaknaan individu (*subjective meaning*) dari subyek yang diteliti, dan oleh karena itu peneliti melakukan wawancara mendalam dengan pihak yang diteliti, termasuk di dalamnya peneliti harus mampu memahami dan mengembangkan kategori-kategori, pola-pola dan analisa terhadap proses-proses sosial yang terjadi di tengah masyarakat yang diteliti.⁶¹

Dalam konteks penelitian ini, peneliti akan memahami aktivitas yang terjadi pada organisasi kepemudaan khususnya yang berkaitan dengan proses politik dan kegiatan politik dari organisasi kepemudaan pada saat penelitian ini dilakukan. Dengan demikian, penelitian akan memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai bagaimana peran organisasi kepemudaan dalam proses politik nasional khususnya dalam rangka pelaksanaan pendidikan politik di Indonesia.

Pemilihan pendekatan kualitatif sebagai pendekatan dalam penelitian ini dikarenakan oleh materi dalam penelitian ini menyangkut proses dari suatu tindakan yang ditunjukkan oleh gejala-gejala berupa pemikiran, ucapan, dan tindakan yang dilakukan oleh anggota suatu komunitas masyarakat, dalam hal ini organisasi kepemudaan. Hal ini sejalan dengan apa yang disebut oleh Creswell mengenai penelitian kualitatif bahwa perhatian utama dari peneliti-peneliti kualitatif adalah berkaitan dengan proses-proses yang terjadi, dan bukan out put

⁶¹ John W. Craswell, *Research Design : Qualitative & Quantitative Approach*, California, Sage Publication, 1994, Hal 157-159

atau hasil.⁶² Dalam hal ini, proses pendirian dan proses dalam rangka implementasi visi, misi, dan program dari organisasi kepemudaan yang diteliti khususnya dalam bidang politik atau pendidikan politik, akan menjadi perhatian utama peneliti sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai realitas yang sebenarnya terjadi.

Sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono, bahwa pendekatan penelitian dapat digunakan untuk penelitian mengenai permasalahan yang belum jelas, holistic, dinamis, dan penuh makna sehingga tidak mungkin data pada situasi social tersebut dijangkau dan dikumpulkan dengan pendekatan lainnya dengan instrument lain seperti tes atau kuesioner.⁶³ Pelaksanaan pendidikan politik bagi organisasi kepemudaan merupakan suatu hal yang dinamis dan holistic, yang memerlukan pendalaman terhadap makna dari masing-masing subjek yang diteliti.

Selain itu, mengingat bahwa masalah dalam penelitian ini terkait dengan perilaku dan peranan manusia, maka menurut Strauss dan Corbin pendekatan yang tepat diterapkan adalah penelitian kualitatif.⁶⁴ Dalam penelitian ini, subjek penelitian adalah organisasi yaitu organisasi kepemudaan, yang juga Strauss dan Corbin lebih tepat menggunakan penelitian kualitatif.⁶⁵

Selanjutnya, pemilihan jenis kualitatif sebagai pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dikarenakan oleh sifat dari penelitian kualitatif sangat dibutuhkan untuk memperoleh jawaban dari rumusan pertanyaan dalam penelitian ini. Sifat-sifat penelitian kualitatif antara lain⁶⁶ :

1. Memahami makna (meaning), dalam hal ini terutama makna terhadap pendidikan politik beserta urgensinya.
2. Memahami konteks khusus yang berkaitan dengan tindakan-tindakan orang-orang yang ada di dalam lingkup subyek yang diteliti, dalam hal ini konteks pada saat ini dalam rangka pelaksanaan pendidikan politik oleh organisasi kepemudaan.

⁶² John W. Craswell, *op.cit.* hal.157-159

⁶³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cet.III, Bandung, Alfabeta: 2007, hal. 145.

⁶⁴ Anselm Strauss & Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 2003, hal. 6.

⁶⁵ *ibid*

⁶⁶ *ibid*

3. Memahami proses melalui mana peristiwa dan tindakan terjadi, dalam hal ini memahami proses atau aktivitas politik yang dilakukan oleh organisasi kepemudaan khususnya dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan politik.
4. Mengembangkan penjelasan kausal, salah satunya ingin mengembangkan mengenai mengapa dan apa indikasi dari terjadinya orientasi politik yang berlebihan di kalangan pemuda terhadap politik praktis seputar kekuasaan.

3.2. Jenis Metode dan Tahapan Penelitian

Jenis penelitian kualitatif yang akan digunakan adalah jenis deskriptif analitis, yang oleh Winarno Surachmad disebutkan memiliki beberapa ciri sebagai berikut⁶⁷ :

1. Memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang, pada masalah-masalah yang aktual, yang dalam hal ini mengenai masalah pelaksanaan pendidikan politik oleh organisasi kepemudaan beserta dinamika yang terjadi di dalamnya.
2. Data yang dikumpulkan, mula-mula disusun dan dijelaskan, kemudian dianalisa (karena itu seringkali disebut sebagai metode deskriptif analitis). Data dari hasil wawancara dengan pimpinan organisasi kepemudaan akan peneliti deskripsikan terlebih dahulu apa adanya, kemudian akan peneliti analisa berdasarkan teori yang relevan dengan pembahasan.

Dengan demikian, penelitian ini akan disajikan dalam bentuk deskriptif analitis, yakni peneliti akan mendeskripsikan hasil analisa yang diperoleh dari sumber data secara sistematis dan komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti yang tertuang dalam pertanyaan penelitian di atas. Sejalan dengan jenis tersebut, maka tahapan yang akan peneliti lakukan dalam penelitian ini merupakan tahapan atau prosedur dalam penelitian kualitatif, sebagaimana yang dikemukakan Emy Susanti, antara lain⁶⁸ :

1. Menetapkan fokus penelitian, yakni pelaksanaan pendidikan politik oleh organisasi kepemudaan.

⁶⁷ Winarno Surachmad, *Dasar dan Teknik Research*, Bandung, Penerbit Tarsito, 1978, hal. 132

⁶⁸ Emy Susanti Hendrarso, *Penelitian Kualitatif : Sebuah Pengantar*, dalam Bagong Suyano & Sutinah (Ed), *Metode Penelitian Sosial*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hal. 172

2. Menentukan Setting dan Subjek Penelitian. Settingnya adalah saat era reformasi berlangsung pasca 1998, dengan subjek utama adalah organisasi kepemudaan.
3. Mengumpulkan data yang diperoleh berdasarkan wawancara dengan pimpinan organisasi kepemudaan beserta dokumen-dokumen terkait.
4. Mengolah data sebagaimana yang peroleh pada angka nomor 3 di atas.
5. Analisis data yang akan dilakukan dengan menggunakan pisau analisis berupa teori pendidikan politik dan teori harapan.

3.3. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang akan digunakan data primer dan data sekunder. Data primer berupa wawancara mendalam secara terstruktur dengan menjadikan beberapa pihak yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dengan permasalahan penelitian sebagai informan kunci (*key informant*). Marshal dan Rossman menyebutkan bahwa wawancara mendalam merupakan teknik pengumpulan data yang didasarkan pada percakapan secara intensif dengan suatu tujuan.⁶⁹ Oleh karena itu, peneliti terlebih dahulu akan mempersiapkan bahan pertanyaan yang akan diajukan dalam wawancaranya tersebut, yang kemudian pada saat wawancara akan dikembangkan lebih lanjut dengan pertanyaan-pertanyaan tambahan informasi yang diperoleh tidak terbatas hanya seputar pertanyaan awal yang diajukan kepada informan. Sebagaimana disebutkan Idrus, bahwa Kelemahan jenis wawancara ini adalah biasanya peneliti begitu terikat dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuatnya sehingga dialog-dialog yang dimunculkan terkesan kaku.⁷⁰ Panduan wawancara yang peneliti susun dalam penelitian ini terdiri berangkat dari dua pertanyaan penelitian, yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dari 6 item informasi yang dibutuhkan, kemudian dituangkan menjadi 13 pertanyaan. Dalam melakukan wawancara mendalam, pertanyaan yang kaku haruslah dihindari dan sebaiknya menggunakan pertanyaan

⁶⁹ Emy Susanti Hendrarso, *op.cit*, hal. 172

⁷⁰ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2009

yang umum berdasarkan substansi setting atau berdasarkan kerangka konseptual.⁷¹

Adapun pihak-pihak yang akan dijadikan sebagai informan kunci antara lain :

1. Pejabat Kementerian Pemuda dan Olahraga dari Deputi terkait.
2. Pimpinan dan anggota organisasi kepemudaan yang akan dipilih berdasarkan klasifikasi keterkaitan dengan partai politik tertentu, baik secara eksplisit maupun implisit.
3. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Komisi X yang membidangi masalah kepemudaan.

Sedangkan data sekunder yang diolah berdasarkan studi kepustakaan terhadap dokumen terkait yang diperoleh baik secara langsung dari sumber data maupun dari media baik cetak maupun elektronik. Dokumen tersebut antara lain dokumen resmi dari Kemenpora, dokumen organisasi kepemudaan yang diteliti, hasil penelitian lain yang terkait dengan permasalahan penelitian, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta referensi lainnya. data dari internet dan media lainnya.

3.4. Teknik Analisis Data

Penelitian kualitatif memiliki standar umum dalam melakukan teknik analisis data yang bertujuan untuk melakukan sistematisasi hasil temuan dari data yang diperoleh. Teknik analisis data tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan data mentah.

Pada tahapan ini, peneliti mengumpulkan seluruh data yang dibutuhkan baik primer maupun sekunder. Data primer yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara mendalam adalah berupa rekaman hasil wawancara mendalam tersebut. Untuk mengumpulkan data tersebut, peneliti mewawancarai enam orang pimpinan organisasi kepemudaan, dan dua orang dari stakeholder yakni Kemenpora dan DPR RI Komisi X bidang pemuda. Sedangkan data sekunder

⁷¹ Emy Susanti Hendrarso, *op.cit*, hal. 172

dikumpulkan dari berbagai dokumen yang terkait baik berupa *hard copy* maupun *soft copy*. Data *hardcopy* yang peneliti peroleh adalah berupa Direktori Kepemudaan dari Kemenpora, sedangkan *softcopy* berupa dokumen-dokumen organisasi kepemudaan maupun Kemenpora yang terkait dengan profil organisasi kepemudaan.

2. Transkrip data

Transkrip data merupakan bentuk pengolahan data primer yang masih mentah berupa hasil rekaman kemudian diolah/didokumentasikan menjadi data berbentuk tulisan hasil wawancara tersebut. Data hasil wawancara dengan subjek terkait, peneliti transkrip apa adanya, sesuai dengan apa yang mereka kemukakan. Hal ini penting untuk memperoleh kedalaman makna, khususnya mengenai pendidikan politik.

3. Pembuatan koding

Pada tahap ini, peneliti akan melakukan peninjauan ulang terhadap hasil transkrip data berisi wawancara mendalam. Kemudian peneliti memberikan kode-kode tertentu terhadap data-data kunci yang terdapat dalam transkrip tersebut sekaligus melakukan pengelompokan. Penjelasan informan yang langsung terkait dengan pendidikan politik akan peneliti beri tanda untuk kemudian menjadi kutipan utama dalam pembahasan. Selain itu, yang bersifat umum juga peneliti beri tanda sebagai penguat argumentasi.

4. Penyimpulan sementara

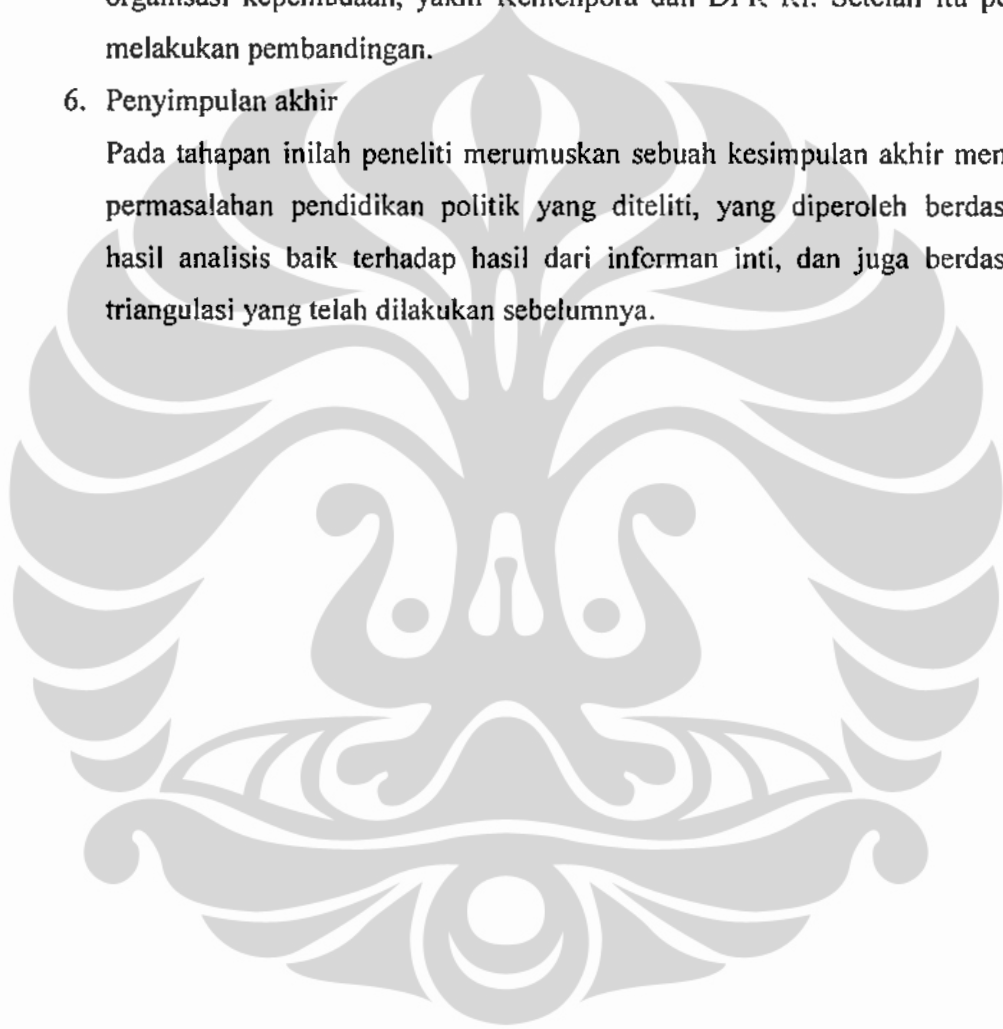
Setelah melakukan tiga langkah di atas, peneliti kemudian membuat kesimpulan sementara yang diperoleh berdasarkan data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data di lapangan. Pada tahapan ini, peneliti belum akan melakukan interpretasi lebih lanjut terhadap data tersebut. Dalam hal ini, peneliti membuat semacam deskripsi umum yang mewakili uraian-uraian informan mengenai pendidikan politik, tanpa diberikan interpretasi terhadap uraian tersebut.

5. Triangulasi

Triangulasi digunakan sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Pada tahapan ini, peneliti melakukan triangulasi dengan meneliti hasil wawancara dengan informan yang berasal dari luar organisasi kepemudaan, yakni Kemenpora dan DPR RI. Setelah itu peneliti melakukan perbandingan.

6. Penyimpulan akhir

Pada tahapan inilah peneliti merumuskan sebuah kesimpulan akhir mengenai permasalahan pendidikan politik yang diteliti, yang diperoleh berdasarkan hasil analisis baik terhadap hasil dari informan inti, dan juga berdasarkan triangulasi yang telah dilakukan sebelumnya.



3.5. Panduan Wawancara

Tema Penelitian	Pertanyaan Penelitian	Informasi Yang Dibutuhkan	Pertanyaan Wawancara	Teknik Pengumpulan Data
<p>Analisis Peran Organisasi Kepemudaan Dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik di Indonesia</p>	<p>Bagaimana peran organisasi kepemudaan saat ini dalam Pelaksanaan pendidikan politik di Indonesia ?</p>	<p>1. Visi OK terhadap pelaksanaan pendidikan politik di Indonesia.</p> <p>2. Program/aktivitas utama dari OK yang selama ini secara kongkrit dijalankan sejak OK tersebut dibentuk.</p> <p>3. Program OK selama ini yang membentuk pendidikan politik.</p>	<p>1. Bagaimana proses pendirian OK dan apa visinya ?</p> <p>2. Bagaimana kondisi secara umum OK xyz saat ini ?</p> <p>3. Bagaimana struktur dan pola kerja OK selama ini ?</p> <p>4. Apakah terdapat visi dan program kerja dari OK yang terkait dengan pendidikan politik di Indonesia ?</p> <p>5. Bagaimana pandangan OK terhadap pentingnya pelaksanaan pendidikan politik di Indonesia dan bagaimana merealisasikannya ?</p>	<p>Dokumen dan wawancara, dengan sumber utama aktivis/pimpinan OK yang bersangkutan, stakeholder yang lain</p>

Tema Penelitian	Pertanyaan Penelitian	Informasi Yang Dibutuhkan	Pertanyaan Wawancara	Teknik Pengumpulan Data
	<p>Bagaimana harapan stakeholder terhadap organisasi dalam pelaksanaan proses pelaksanaan pendidikan politik di Indonesia</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Model ideal OK 2. Harapan stakeholder. 3. Kesesuaian terhadap harapan dengan kenyataan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kondisi secara umum OK yang ada saat ini ? 2. Apa saja bentuk dan klasifikasi OK yang ada selama ini ? 3. Bagaimana sebenarnya model ideal dari sebuah OK ? 4. Bagaimana pandangan terhadap pendidikan politik dan urgensinya ? 5. Dalam model ideal tersebut, apakah harus terdapat visi pelaksanaan pendidikan politik di Indonesia ? 6. Apakah saat ini terdapat OK yang aktif dalam pelaksanaan pendidikan politik ? 7. Bagaimana bentuk peran aktif yang diharapkan dalam pelaksanaan pendidikan politik di Indonesia ? 8. Apa upaya yang dapat dilakukan sehingga pemuda dapat ikut serta dalam proses pelaksanaan pendidikan politik di Indonesia ? 	<p>Dokumen dan Wawancara, dengan sumber utama adalah Pejabat Kemempora, Anggota DPR RI Komisi X, serta aktivis organisasi kepemudaan</p>

BAB 4

GAMBARAN UMUM ORGANISASI KEPEMUDAAN

Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, bahwa penelitian ini akan menganalisis peran organisasi kepemudaan dalam pelaksanaan pendidikan politik di Indonesia pada masa reformasi. Sebelum dikemukakan secara mendalam mengenai hal tersebut, terlebih dahulu peneliti akan menjabarkan gambaran umum mengenai kiprah organisasi kepemudaan di Indonesia. Agar penjabaran tersebut terurai secara sistematis, peneliti akan membagi penjabaran menjadi dua bagian, yang pertama berdasarkan periodisasi dari organisasi kepemudaan yang lahir diawali dengan munculnya pergerakan Budi Utomo pada tahun 1908, sampai dengan organisasi kepemudaan yang ada saat ini yakni pada masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang; dan yang kedua berdasarkan klasifikasi organisasi kepemudaan, yang akan menguraikan profil dari organisasi kepemudaan menurut klasifikasi yang telah disebutkan sebelumnya. menggunakan periodisasi.

4.1. Berdasarkan Periodisasi

4.1.1. Periode 1908-1928

Sejarah panjang bangsa Indonesia telah memosisikan pemuda sebagai pelaku-pelaku perubahan di setiap zaman. Tak hanya masa perjuangan kemerdekaan tetapi juga masa setelah kemerdekaan. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia telah mencatat peran penting pemuda yang dimulai dari pergerakan Budi Utomo tahun 1908, Sumpah Pemuda 1928, Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945, pergerakan pemuda, pelajar, dan mahasiswa tahun 1966, sampai dengan pergerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang telah membawa bangsa Indonesia memasuki masa reformasi.

Periode 1908 ini ditandai oleh lahirnya Budi Utomo di Jakarta pada tanggal 20 Mei 1908. Awalnya Budi Utomo terinspirasi oleh gagasan Dr. Wahidin Soedirohoesodo, seorang dokter dan pemimpin redaksi majalah *Retnodhoemilah*.

Melalui majalah inilah Wahidin mulai melontarkan gagasan-gagasannya tentang kebangkitan Jawa dan peradaban baru.⁷²

Budi Utomo lahir dari pertemuan-pertemuan dan diskusi yang sering dilakukan di perpustakaan School tot Opleiding van Inlandsche Artsen oleh beberapa mahasiswa, antara lain Dr. Soetomo, Goenawan Mangoenkoesoemo, Goembrek, Saleh, dan Soeleman.⁷³ Mereka memikirkan nasib bangsa yang sangat buruk dan selalu dianggap bodoh dan tidak bermartabat oleh bangsa lain (Belanda), serta bagaimana cara memperbaiki keadaan yang amat buruk dan tidak adil itu. Di dalam forum itu mereka membahas dan memahami akar masalah dari kemiskinan, kebodohan dan ketidakadilan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetrasi sistem kolonialisme Barat yang berbasis pada merkantilisme.⁷⁴

Menurut para peninjau di zaman itu, bangkitnya bangsa Indonesia sejak tahun 1908 tersebut disebabkan oleh tiga hal, yaitu (1) mulai sadar dan bangkitnya bangsa Indonesia seperti bangsa-bangsa Asia lainnya disebabkan oleh getaran akibat kalahnya bangsa kulit putih (Rusia) oleh bangsa kulit berwarna (Jepang) dalam peperangan Rusia-Jepang pada tahun 1904-1905; (2) taraf intelektual bangsa Indonesia telah meningkat; dan (3) kaum terpelajar Indonesia telah banyak mengetahui tentang kemajuan-kemajuan berfikir beberapa kaum terkemuka Eropa Barat.⁷⁵

Kelahiran Boedi Oetomo pada saat itu kemudian menjadi tonggak yang menumbuhkan semangat perjuangan, sekaligus menjadi inspirasi bagi berdirinya berbagai organisasi di seluruh pelosok tanah air, baik yang bersifat kedaerahan, politik, serikat pekerja, keagamaan, kewanitaan, maupun kepemudaan. Pada gelombang berikutnya, muncul sejumlah organisasi seperti Sarekat Islam, dan berbagai organisasi lainnya. Hal ini mewarnai awal kebangkitan nasional, dan mencapai puncaknya pada tahun 1928, dengan bersatunya berbagai kelompok organisasi—khususnya organisasi kepemudaan—untuk mewujudkan suatu gerakan kebangsaan yang sejati, melalui Sumpah Pemuda : satu tanah air, satu

⁷² Kementerian Pemuda dan Olahraga, *op.cit.*, hal. 5

⁷³ <http://www.gudangmateri.com/2010/04/boedi-utomo-dan-kebangkitan-nasional.html>

⁷⁴ *ibid*

⁷⁵ Kementerian Pemuda dan Olahraga, *Op.cit.*, hal. 5

bangsa, dan satu bahasa – Indonesia. Sejak itu, nasionalisme Indonesia terus berkembang, terus menjalar, dan terus berkobar di seluruh penjuru tanah air.⁷⁶

4.1.2 Periode 1928-1945

Pada tahun 1915, di seluruh pelosok daerah di Indonesia banyak didirikan organisasi kepemudaan yang dilatar belakangi oleh kesamaan suku dan daerah asal. Organisasi kepemudaan tersebut antara lain Tri Koro Darmo yang kemudian menjadi Jong Java (1915), Jong Sumatranen Bond (1917), Jong Islamieten bond (1924), Jong Batak, Jong Minahasa, Jong Celebes, Jong Ambon, Sekar Rukun dan Pemuda Kaum Betawi. Selain organisasi yang bersifat kedaerahan, terdapat satu organisasi kepemudaan yang menjadi wadah pemuda nasionalis radikal non kedaerahan, yaitu Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI) yang berdiri setelah selesai Kongres Pemuda I pada tahun 1926. Tokoh-tokohnya adalah Sigit, Soegondo Djojopoespito, Suwirjo, S. Reksodipoetro, Muhammad Yamin, A. K. Gani, Tamzil, Soenarko, Soemanang, dan Amir Sjarifudin. Selain PPPI, berdiri pula dua kelompok studi pemuda tingkat nasional yakni Kelompok Studi Indonesia (KSI) yang didirikan di Surabaya oleh Soetomo, dan Kelompok Studi Umum yang didirikan oleh Soekarno di Bandung. PPPI kemudian memprakarsai diadakannya Kongres Pemuda II diadakan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1928, yang salah satu agendanya adalah pembacaan teks Sumpah Pemuda yang kemudian dibacakan di Jalan Kramat Raya nomor 106 Jakarta Pusat (saat ini menjadi Museum Sumpah Pemuda yang pada waktu itu adalah milik dari seorang Tionghoa bernama Sie Kong Liong). Kongres tersebut dihadiri oleh perwakilan dari seluruh organisasi kepemudaan di Indonesia pada saat itu, yang total pesertanya berjumlah 750 pemuda. Di antara peserta yang hadir terdapat nama-nama yang kemudian terkenal seperti Kartakusumah (PNI Bandung), Abdulrachman (B.O Jakarta), Kartosoewirjo (P.B Sarekat Islam), Muh. Roem, Soewirjo, Sumanang, Masdani, Anwari, Tamzil, AK Gani, Kasman Singodimedjo, Saerun (wartawan Keng Po), WR Supratman. Sedangkan dari

⁷⁶ Kementerian Pemuda dan Olahraga, *Opcit*, hal. 5

organisasi Volksraad yang hadir adalah Soerjono dan Soekawati dan dari pihak Pemerintah Hindia Belanda yang hadir adalah Dr.Pyper dan Van der Plas.⁷⁷

Banyaknya peserta yang hadir pada saat itu merupakan hal yang wajar karena panitia kongres tersebut memang berasal dari perwakilan masing-masing organisasi kepemudaan yang dilibatkan. Berikut ini susunan kepanitiaan kongres yang sangat bersejarah tersebut⁷⁸ :

- Ketua : Soegondo Djojopoespito (PPPI)
- Wakil Ketua : R.M. Djoko Marsaid (Jong Java)
- Sekretaris : Mohammad Jamin (Jong Sumateranen Bond)
- Bendahara : Amir Sjarifuddin (Jong Bataks Bond)
- Pembantu I : Djohan Mohammad Tjai (Jong Islamieten Bond)
- Pembantu II : R. Katja Soengkana (Pemoeda Indonesia)
- Pembantu III : Senduk (Jong Celebes)
- Pembantu IV : Johannes Leimena (Jong Ambon)
- Pembantu V : Rochjani Soe'ed (Pemoeda Kaoem Betawi).
- Pengamat : 4 pemuda dari Tionghoa, antara lain Kwee Thiam Hong, Oey Kay Siang, John Lauw Tjoan Hok, dan Tjio Djien Kwie.

Setelah Kongres Pemuda II yang melahirkan Sumpah Pemuda 1928, beberapa kongres selanjutnya secara berkelanjutan diadakan oleh pemuda Indonesia yang pada saat memiliki semangat nasionalisme yang sangat tinggi. Kebersatuan pemuda Indonesia tersebut semakin menemukan relevansinya seiring dengan datangnya bangsa Jepang yang menjajah Indonesia sejak tahun 1942. Sejak saat itu, isu sentral yang menjadi agenda utama dari para pemuda Pemuda Indonesia adalah merebut kemerdekaan dari Jepang. Tokoh-tokoh golongan tua yang merupakan alumni Kongres Pemuda II tahun 1928 kemudian menjadi tokoh yang juga berperang penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia tahun 1945, antara lain Soekarno, Mohammad Hatta, Muhammad

⁷⁷ <http://www.museumsumpahpemuda.go.id/>

⁷⁸ ibid

Yamin, Amir Sjarifuddin, J. Leimena, WR. Supratman, Soegondo, dan lain-lain. Sedangkan tokoh pemuda pada waktu itu antara lain Sukarni, Chairul Saleh, dan Sayuti Melik yang berusia di bawah 30 tahun.⁷⁹ Hal tersebut menunjukkan adanya kesinambungan gerakan pemuda yang diawali sejak tahun 1908 sampai dengan kemerdekaan Indonesia 1945.

Selain tokoh-tokoh tersebut, terdapat pula seorang tokoh pemuda yang terkenal dengan pidatonya pada tanggal 10 November 1945 di Surabaya, yakni Bung Tomo. Pemuda yang bernama lengkap Sutomo tersebut merupakan tokoh pemuda yang terkenal karena heroismenya dalam membangkitkan semangat rakyat untuk melawan kembalinya penjajah Belanda melalui tentara NICA (Inggris dan sekutu). Melalui pidatonya, Bung Tomo yang pada saat itu berusia 25 tahun berusaha membangkitkan semangat rakyat Surabaya melalui radio-radio untuk memperjuangkan darah kemerdekaan. Pada tahun 2008, atas jasa-jasanya Bung Tomo kemudian didaulat sebagai Pahlawan Nasional oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, setelah sebelumnya pada tahun 1946 Presiden Soekarno menetapkan tanggal 10 November sebagai hari pahlawan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9/Um yang ditetapkan di Kota Yogyakarta.⁸⁰

4.1.3. Periode Pasca Kemerdekaan-Pra Orde Baru (1966)

Setelah berhasil memproklamkan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, sejarah kemudian mencatat bahwa kelompok pemuda terus memberikan kontribusi positif dalam proses penyelenggaraan pemerintahan pasca kemerdekaan. Pada tahun 1966, rakyat Indonesia yang salah satunya terdiri dari organisasi kepemudaan dan mahasiswa pada saat itu menuntut pemerintahan Orde Lama pimpinan Soekarno untuk segera mengakhiri kekuasaannya sebagai presiden. Tuntutan tersebut utamanya dilatarbelakangi oleh peristiwa pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1965 yang kemudian dikenal dengan peristiwa G-30/S/PKI. Oleh karena itu, pembubaran PKI merupakan kemudin menjadi salah satu dari tiga tuntutan rakyat pada saat itu yang kemudian dikenal dengan sebutan Tiga Komando Rakyat (TriKora).

⁷⁹ www.organisasi.org

⁸⁰ www.ngada.org

Tuntutan tersebut disampaikan oleh beberapa organisasi kepemudaan dan kepelajaran antara lain Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) (gabungan dari Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Sekretariat Bersama Organisasi-organisasi Lokal (SOMAL), Mahasiswa Pancasila (Mapancas), dan Ikatan Pers Mahasiswa (IPMI)), Kesatuan Aksi Pelajar Pemuda Indonesia (KAPI), Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI); Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), dan Kesatuan Aksi Wanita Indonesia (KAWI). Tokoh-tokohnya yang terkenal antara lain Cosmas Batubara (Eks Ketua Presidium KAMI Pusat), Sofyan Wanandi, dan Yusuf Wanandi yang ketiganya berasal dari PMKRI), serta Akbar Tanjung dari HMI). Pada tanggal 20 Februari 1967, Presiden Soekarno menyampaikan pengumuman yang salah satu isinya adalah menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Jenderal Soeharto sebagai pengemban Tap MPRS No. IX/MPRS/1966 tentang penegasan terhadap kelanjutan dan perluasan penggunaan Supersemar.⁸¹

4.1.4. Periode Orde Baru-1998

Selanjutnya, di era pemerintahan Orde Baru pimpinan Presiden Soeharto, peran aktif pemuda Indonesia masih terlihat, sampai dengan diberlakukannya era Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) pada tahun 1978 yang mengarahkan mahasiswa untuk memfokuskan diri pada jalur kegiatan akademik, dan menjauhkan kegiatan dari aktivitas politik karena dinilai secara nyata dapat membahayakan posisi pemerintahan. Peran aktif tersebut paling menonjol pada tahun 1974, melalui peristiwa yang dikenal dengan peristiwa Malaria atau 5 Januari, yang mengangkat isu sentral perlawanan terhadap kebijakan pemerintahan Orde Baru yang tidak berpihak kepada rakyat, seperti kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), isu pemberantasan korupsi,

⁸¹ Lihat di buku "Proses Pelaksanaan Keputusan MPRS No.5/MPRS/ 1966 Tentang Tanggapan Majelis Permusjawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Terhadap Pidato Presiden/Mandataris MPRS di Depan Sidang Umum Ke-IV MPRS Pada Tanggal 22 Djuni 1966 Yang Berjudul Nawaksara" dalam <http://penasoeckarno.com>. Lihat juga di Edi Songo, *Buku Genius Senior*, PT. Wahyu Media, Jakarta, 2007. hal. 722.

kecurangan Golkar pada Pemilu Tahun 1972, dan kebijakan lainnya. Gerakan mahasiswa pada saat itu terkenal dengan sebutan “Mahasiswa Menggugat” yang dimotori oleh Arif Budiman, kemudian melalui komunitas yang mereka bentuk bernama Komite Anti Korupsi (KAK) yang diketuai oleh Wilopo. Terkait dengan kecurangan pemilu, para pemuda dan mahasiswa kemudian mendeklarasikan Golongan Putih (Golput) yang dimotori oleh Arif Budiman, Adnan Buyung Nasution, serta Asmara Nababan. Berbeda dengan angkatan tahun 1966, gerakan pada tahun 1974 tidak didukung oleh kekuatan militer sehingga tidak berhasil memberikan pengaruh yang signifikan terhadap isu yang diangkat.

4.1.5. Periode Pasca 1998

Setelah era NKK/BKK berakhir, tepatnya pada tahun 1998, pemuda Indonesia berperan dan memiliki andil yang cukup signifikan dalam menjatuhkan pemerintahan Orde Baru pimpinan Presiden Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun sejak 1966. Pada saat itu, pemuda yang didominasi oleh kalangan mahasiswa menggulirkan gerakan politik yang menuntut pemerintah yang berkuasa untuk lengser dari jabatannya. Tuntutan yang salah satunya dilatarbelakangi oleh krisis ekonomi yang berkepanjangan dan berlanjut menjadi krisis multi-dimensi tersebut kemudian disampaikan melalui sebuah usaha perubahan sosial yang didukung oleh kesadaran bersama dari para mahasiswa. Momen ini kemudian berkembang menjadi suatu gerakan bersama yang menuntut perubahan di beberapa bidang, khususnya sistem pemerintahan. Tokoh gerakan mahasiswa yang menjadi aktivis pada perjuangan reformasi tahun 1998 antara lain Rama Pratama dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMI), Nusron Wahid dari Pergerakan Mahasiswa Muslim Indonesia (PMII), Adian Napitupulu dari Forum Kota (Forkot), Selamat Nurdin dari Senat Mahasiswa Universitas Indonesia (SMUI), Bayquni dari Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta (FKSMJ) yang menjadi penggagas Deklarasi Ciganjur, dan Budiman Sidjarmiko yang merupakan aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang pada saat itu belum diakui sebagai sebuah Partai Politik.

Keberhasilan pemuda dan mahasiswa yang terkenal dengan sebutan Angkatan '98 terus mempengaruhi gerakan pemuda dan mahasiswa hingga saat ini. Heroisme Angkatan '98 yang tak kalah dengan Angkatan '45 dan Angkatan '66 membuat para mahasiswa selalu terjaga daya kritisnya. Forum-forum mahasiswa tak lepas dari pembicaraan dan diskusi tentang perpolitikan nasional dan keinginan untuk memperbaiki kehidupan rakyat.⁸²

Reformasi tahun 1998 yang dipelopori oleh Angkatan '98 mendorong demokrasi mekar di Indonesia. Lima paket undang-undang politik yang membelenggu diganti dengan yang baru dan pemilu multipartai pertama sejak era Orde Baru dapat terselenggara pada tahun 1999. Reformasi juga membuat kebebasan pers, kebebasan berserikat, dan kebebasan berkeyakinan semakin dihargai. Organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik bermunculan seiring dengan euphoria reformasi.⁸³

Euforia reformasi tersebut di atas juga dialami oleh kalangan pemuda. Pada Pemilu tahun 1999 pemuda dan mahasiswa banyak terlibat dalam pemantauan pemilu. Hal ini dilakukan karena trauma dengan pelaksanaan pemilu di era Orde Baru yang selalu dipenuhi dengan kecurangan. HMI memiliki lembaga pemantau pemilu HMI, sedangkan PMII membentuk JAMMPI (Jaringan Masyarakat Pemantau Pemilu Indonesia), sedangkan para mahasiswa intrakampus membentuk UNFREL (*University Network for Free and Fair Election*).⁸⁴

4.2. Berdasarkan Klasifikasi Organisasi Kepemudaan

4.2.1. Organisasi Sayap Partai Politik⁸⁵

Pada tahun 1945, dari dinamika pergerakan nasional yang ditandai dengan kehadiran kelompok-kelompok studi, dan akibat pengaruh sikap penguasa Belanda yang menjadi Liberal, muncul kebutuhan baru untuk menjadi partai politik, terutama dengan tujuan memperoleh basis massa yang luas. Kelompok

⁸² Kementerian Pemuda dan Olahraga, *Opcit*, hal. 24

⁸³ *ibid*

⁸⁴ *ibid*, hal. 25

⁸⁵ Diolah dari www.wikipedia.com dan Sejarah Konsensus Politik Indonesia (Khotibul Umam, *op.cit*).

Studi Indonesia berubah menjadi Partai Bangsa Indonesia (PBI), sedangkan Kelompok Studi Umum menjadi Perserikatan Nasional Indonesia (PNI).

Secara umum kondisi pendidikan maupun kehidupan politik pada zaman pemerintahan Jepang jauh lebih represif dibandingkan dengan kolonial Belanda, antara lain dengan melakukan pelarangan terhadap segala kegiatan yang berbau politik; dan hal ini ditindak lanjuti dengan membubarkan segala organisasi pelajar dan mahasiswa, termasuk partai politik, serta insiden kecil di Sekolah Tinggi Kedokteran Jakarta yang mengakibatkan mahasiswa dipecat dan dipenjarakan.

Praktis, akibat kondisi yang vacuum tersebut, maka mahasiswa kebanyakan akhirnya memilih untuk lebih mengarahkan kegiatan dengan berkumpul dan berdiskusi, bersama para pemuda lainnya terutama di asrama-asrama. Tiga asrama yang terkenal dalam sejarah, berperan besar dalam melahirkan sejumlah tokoh, adalah Asrama Menteng Raya, Asrama Cikini, dan Asrama Kebon Sirih. Tokoh-tokoh inilah yang nantinya menjadi cikal bakal generasi 1945, yang menentukan kehidupan bangsa. Salah satu peran angkatan muda 1945 yang bersejarah, dalam kasus gerakan kelompok bawah tanah yang antara lain dipimpin oleh Chairul Saleh dan Soekarni saat itu, yang terpaksa menculik dan mendesak Soekarno dan Hatta agar secepatnya memproklamkan kemerdekaan, peristiwa ini dikenal kemudian dengan peristiwa Rengasdengklok.

Sejak kemerdekaan, muncul kebutuhan akan aliansi antara kelompok-kelompok mahasiswa, diantaranya Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia (PPMI), yang dibentuk melalui Kongres Mahasiswa yang pertama di Malang tahun 1947. Selanjutnya, dalam masa Demokrasi Liberal (1950-1959), seiring dengan penerapan sistem kepartaian yang majemuk saat itu, organisasi mahasiswa ekstra kampus kebanyakan merupakan organisasi dibawah partai-partai politik. Misalnya, PMKRI Perhimpunan Mahasiswa Katholik Republik Indonesia dengan Partai Katholik, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dekat dengan PNI, Concentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI) dekat dengan PKI, Gerakan Mahasiswa Sosialis Indonesia (Gemsos) dengan PSI, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) berafiliasi dengan Partai NU, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dengan Masyumi, dan lain-lain.

Diantara organisasi mahasiswa pada masa itu, CGMI lebih menonjol setelah PKI tampil sebagai salah satu partai kuat hasil Pemilu 1955. CGMI secara berani menjalankan politik konfrontasi dengan organisasi mahasiswa lainnya, bahkan lebih jauh berusaha memengaruhi PPMI, kenyataan ini menyebabkan perseteruan sengit antara CGMI dengan HMI dan, terutama dipicu karena banyaknya jabatan kepengurusan dalam PPMI yang direbut dan diduduki oleh CGMI dan juga GMNI-khususnya setelah Kongres V tahun 1961.

Seiring dengan metode represif yang diterapkan oleh Orde Baru, organisasi sayap partai politik tersebut lambat laun kemudian menjadi mati geraknya, hingga muncul kembali pasca reformasi tahun 1998. Gerakan 1998 yang menuntut reformasi dan dihapuskannya "KKN" (korupsi, kolusi dan nepotisme) pada 1997-1998, lewat pendudukan gedung DPR/MPR oleh ribuan mahasiswa, akhirnya memaksa Presiden Soeharto melepaskan jabatannya. Berbagai tindakan represif yang menewaskan aktivis mahasiswa dilakukan pemerintah untuk meredam gerakan ini di antaranya: Peristiwa Cimanggis, Peristiwa Gejayan, Tragedi Trisakti, Tragedi Semanggi I dan II, Tragedi Lampung. Gerakan ini terus berlanjut hingga pemilu 1999. Pasca Pemilu 2009, terutama menjelang Pemilu 2004, dengan menggunakan Undang-Undang Partai Politik pada saat itu, maka muncullah berbagai organisasi kepemudaan sayap partai politik yang baru, misalnya Gerakan Muda Demokrat Indonesia (partai Demokrat), Gerakan Muda Keadilan (Partai Keadilan Sejahtera), Angkatan Muda Ka'bah (Partai Persatuan Pembangunan), Barisan Muda Damai Sejahtera (Partai Damai Sejahtera), dan lain sebagainya. Mereka kemudian aktif dalam berbagai aktivitas politik, terutama tentunya dalam rangka menyokong kemenangan partai politik induknya pada Pemilu 2004. Dalam konteks itulah mereka kemudian banyak melakukan pendidikan politik melalui berbagai kegiatan kaderisasi, sosialisasi, dan partisipasi politik.

4.2.2. Organisasi Kepemudaan Sayap Ormas (Pemuda Muhammadiyah)⁸⁶

Pemuda Muhammadiyah didirikan di Yogyakarta pada tanggal 26 Zulhijjah 1350 Hijriyah, bertepatan dengan tanggal 2 Mei 1932 Miladiyah. Pemuda Muhammadiyah adalah organisasi otonom Muhammadiyah, yang merupakan gerakan Islam, amar ma'ruf nahi munkar, bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia. Pemuda Muhammadiyah memiliki tujuan yaitu menghimpun, membina dan menggerakkan potensi pemuda Islam demi terwujudnya kader Persyarikatan, kader umat dan kader bangsa dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah

Awal berdirinya Pemuda Muhammadiyah secara kronologis dapat dikaitkan dengan keberadaan Siswo Proyo Priyo (SPP), suatu gerakan yang sejak awal diharapkan KH. Ahmad Dahlan dapat melakukan kegiatan pembinaan terhadap remaja/pemuda Islam. Dalam perkembangannya SPP mengalami kemajuan yang pesat, hingga pada Konggres Muhammadiyah ke-21 di Makasar pada tahun 1932 diputuskan berdirinya Muhammadiyah Bagian Pemuda, yang merupakan bagian dari organisasi dalam Muhammadiyah yang secara khusus mengasuh dan mendidik para pemuda keluarga Muhammadiyah. Keputusan Muhammadiyah tersebut mendapat sambutan luar biasa dari kalangan pemuda keluarga Muhammadiyah, sehingga dalam waktu relatif singkat Muhammadiyah Bagian Pemuda telah terbentuk di hampir semua ranting dan cabang Muhammadiyah. Dengan demikian pembinaan Pemuda Muhammadiyah menjadi tanggung jawab pimpinan Muhammadiyah di masing-masing level. Misalnya, di tingkat Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggung jawab mengasuh, mendidik dan membimbing Pemuda Muhammadiyah diserahkan kepada Majelis Pemuda, yaitu lembaga yang menjadi kepanjangan tangan dan pembantu Pimpinan Pusat yang memimpin gerakan pemuda.

⁸⁶ www.pemudamuhammadiyah.org

Selanjutnya dengan persetujuan Majelis Tanwir, Muhammadiyah Bagian Pemuda dijadikan suatu ortom yang mempunyai kewenangan mengurus rumah tangga organisasinya sendiri. Akhirnya pada 26 Dzulhijjah 1350 H bertepatan dengan 2 Mei 1932 secara resmi Pemuda Muhammadiyah berdiri sebagai ortom.

Kendati secara resmi baru berdiri pada 2 Mei 1932, Pemuda Muhammadiyah tidak bisa dipisahkan dari pertumbuhan awal Muhammadiyah. Di daerah-daerah di Jawa Timur, berdirinya Muhammadiyah sering didahului oleh kegiatan-kegiatan yang dipelopori oleh kalangan pemuda. Pada awal pertumbuhan Muhammadiyah di berbagai daerah, cabang dan ranting mengadakan kegiatan-kegiatan di bidang kepemudaan dan kependuan. Cabang-cabang dan ranting mengadakan HW yang menjadi wadah pembinaan anak-anak muda Muhammadiyah. Usaha-usaha pendirian HW dilakukan oleh cabang dan ranting sejak awal pertumbuhan Muhammadiyah.

Pertumbuhan Pemuda Muhammadiyah pada dekade 1930-an tergolong dinamis, dan paruh kedua dekade itu setiap cabang memiliki bagian Pemuda Muhammadiyah. Terbukti dengan pelaksanaan konferensi-konferensi daerah yang diikuti oleh pimpinan Pemuda Muhammadiyah cabang dan ranting. Pada 1937, dilaksanakan konferensi Pemuda Muhammadiyah di berbagai daerah. Hingga saat ini, pengalaman dan eksistensi Muhammadiyah yang masih kuat membuat Pemuda Muhammadiyah pun tetap eksis menjalankan perannya khususnya dalam membina generasi muda khususnya kader-kader muda Muhammadiyah. Dalam konteks itulah kemudian mereka beraktivitas, yang salah satunya atau inheren di dalamnya kegiatan politik khususnya pendidikan politik.

4.2.3. Organisasi Kepemudaan Independen (Gerakan Pemuda Islam)⁸⁷

Pada awal kelahirannya yaitu sejak sukses melakukan mobilisasi rakyat dalam rapat raksasa di lapangan IKADA, semakin banyak kaum muslimin yang datang ke Balai Muslimin di jalan Kramat Raya No. 19 dan menyatakan hasrat dan keinginannya untuk bergabung didalam perjuangan para mahasiswa STI (Sekolah Tinggi Islam). Melihat begitu besarnya simpati kaum muda terhadap

⁸⁷ www.gerakanpemudaislam.wordpress.com

perjuangan para pemuda Islam, juga mengingat tingkatan perjuangan yang lebih memerlukan pengorganisasian yang mantap, para mahasiswa STI merasa perlu membentuk wadah perjuangan para pemuda Islam. Wadah itu sejak semula direncanakan untuk tidak berafiliasi kepada sesuatu partai politik ataupun kepada organisasi yang ada.

Sejak revolusi meletus kemudian proklamasi 17 Agustus 1945, di dalam kalangan pemimpin Masyumi pada waktu itu timbul hasrat untuk mengadakan suatu ikatan dari pemuda Islam yang bersifat militan, gerakan pemuda yang mempunyai semangat jihad untuk kemerdekaan agama, bangsa dan tanah air. Dan yang sangat besar sekali memberikan dorongannya kearah pembentukan organisasi tersebut ialah M. Natsir, K.H.A. Wahid Hasjim, dan Anwar Tjokroaminoto.

Perpaduan pemikiran ketiga pemimpin ini berputar pada tiga pokok tujuan, yang harus terdapat pada organisasi pemuda Islam Indonesia yang dicita-citakan, yaitu pertama meliputi revolusi, kedua harus dapat menciptakan kader-kader dan bibit pemimpin politik dari perjuangan ummat, dan ketiga harus merupakan suatu lapangan perjuangan yang dapat mempertemukan pemuda-pemuda yang berpendidikan sekolah umum.

Ketika semakin banyak pemuda Jakarta yang bergabung dengan markas perjuangan Kramat Raya 19, terpikir oleh beberapa orang untuk mengganti nama dan mengubah struktur organisasi PP STI supaya dapat menampung dan menjadi wadah perjuangan pemuda Islam. Dalam salah satu rapat anggota STI yang dipimpin oleh Suroto Kunto, yang dihadiri mahasiswa Sekolah Tinggi Islam, pemuda-pemuda Islam di Jakarta, seperti Anwar Harjono, Karim Halim, Ahmad Buchari, Djanamr Adjam, Sjadeli Muchsin, Adnan Sjahmi, Masmimar, Sjarwani, dan para pemuka Islam yang dapat dicapai ketika itu, disepakati perubahan nama PP STI, pembuatan anggaran dasar, dan memilih pengurus baru termasuk orang-orang di luar STI yang bersimpati kepada perjuangan pemuda Islam.

Akhirnya organisasi baru itu bernama Gerakan, maka jelaslah bahwa sifatnya akan selalu bergerak, menuju kearah perbaikan dan kemajuan sesuai sifat pemuda, dinamis, lincah, cekatan, siap berkorban, tidak selalu lamban. Kata-kata pemuda

dipakai, karena wadah baru itu memang diperuntukan para pemuda, bunga bangsa.

Kata-kata Islam dipakai, karena tekanan memang diletakkan pada kata-kata itu, memberi identitas khusus kepada segenap anggotanya, bahwa mereka adalah pemuda Islam, yang berjuang dengan azas dan dasar ke-Islam-an, dalam mencari ridho Allah dan ikut mempertahankan Negara Republik Indonesia.

Untuk lebih memberi penegasan lagi, bahwa pemuda Islam yang bergerak itu memang pemuda Islam di Indonesia, maka nama Indonesia pun harus dibubuhkan dibelakangnya, sehingga wadah baru itu nama lengkapnya adalah Gerakan Pemuda Islam Indonesia.

Pada waktu itu menjelang sore hari 16.30 wib tanggal 2 Oktober 1945 diresmikan di Balai Muslimin dengan ketua terpilih adalah Harsono Tjokroaminoto seorang tokoh pemuda, Moefraini Moekmin, shodancho yang melatih kemiliteran para mahasiswa STI, A. Karim Halim, pemuda lulusan AMS. Dengan tujuan pertama mempertahankan Negara Republik Indonesia, dan kedua mensyiarkan agama Islam. Dengan susunan sebagai berikut : Ketua : Harsono Tjokroaminoto; Wakil Ketua I : A. Karim Halim; Wakil Ketua II : Moefraini Moemin; Sekretaris Umum : Anwar Harjono; Bendahara Pembantu : Ahmad Buchari; Pembantu : Djanamar Adjam; Pembantu : Adnan Sjamni

GPII menempatkan diri sebagai organisasi yang bisa menerima pemuda dari semua kalangan Islam. Bahkan dalam perkembangannya –karena sebelum ada GPII sudah ada organisasi pemuda Islam yang mengkhususkan diri dalam perjuangan kelasykaran, yaitu Hizbullah- maka pada tanggal 5 Oktober 1945 diadakan kesepakatan untuk menggandengkan penyebutan GPII dengan Hizbullah. GPII garis miring atau dalam kurung Hizbullah.

Suasana Jakarta yang amat genting pada waktu itu, dirasakan tidak kondusif dan tidak menguntungkan perjuangan GPII. Karena itu, mendahului hijrahnya pemerintah ke Yogyakarta, sejak 22 November 1945, GPII memindahkan pucuk pimpinan ke Yogyakarta. Dalam suasana revolusi, pucuk pimpinan GPII pun beberapa kali mengalami perubahan. Mula-mula Anton Timur Djailani dipercaya memimpin GPII menggantikan Harsono Tjokroaminoto,

kemudian Djailani diganti oleh Mr. R.A. Kasmat, sebelum akhirnya kepemimpinan GPII dipercayanya kepada R.H. Benjamin.

Susunan kepengurusan PP GPII dimasa revolusi itu ialah sebagai berikut :

- Ketua Umum : R.H. Benjamin
- Wakil Ketua : Mh. Mawardi
- Sekretaris Umum : Anwar Harjono
- Sekretaris : Daris Tamini
- Bendahara Umum : H. Zaini Dahlan
- Wakil Bendahara : Djindar Tamini
- Ketua Bagian Siasat : Harsono Tjokroaminoto
- Ketua Bagian Perencana : Burhanuddin Harahap
- Ketua Bagian Perhubungan : Ahmad Buchari
- Ketua Bagian Penerangan : Asdi Nardju
- Ketua Bagian Ekonomi : Saibani
- Ketua Bagian Sosial : Amien Sjahri
- Pembantu Umum : Djanamar Adjam
- Pembantu Umum : Sudjono Hardjosudiro
- Pembantu Umum : Adnan Sjamni
- Pembantu Umum : Muh. Koen Sjarwanie

Dalam pada itu, ditengah kesibukan para aktifis melakukan konsolidasi GPII, di Yogyakarta terjadi sebuah peristiwa yang amat bersejarah bagi ummat Islam di tanah air, yaitu diselenggarakan Kongres Ummat Islam Indonesia pada tanggal 7 dan 8 November 1945. Kongres akhirnya menyepakati dibentuknya partai politik Islam, Masyumi, sebagai satu-satunya wadah perjuangan politik ummat Islam Indonesia. Dikalangan kongres waktu itu ada dua usul tentang nama partai yang akan dibentuk. Satu kalangan menghendaki nama Masyumi, karena sudah populer, karena Masyumi didirikan dizaman pendudukan Jepang. Kalangan kedua mengusulkan nama Partai Rakyat Islam. Tetapi akhirnya nama Masyumi juga yang disepakati dengan penegasan bahwa nama itu bukan lagi singkatan dari Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Karena itu lalu disebut "Partai Politik Islam Masyumi"

Keputusan penting lain yang diambil kongres ialah :

1. Bahwa GPII adalah satu-satunya gerakan pemuda Islam dalam lapangan politik.
2. Bahwa Hizbullah adalah satu-satunya gerakan pemuda Islam dalam lapangan militer.
3. Bahwa Sabilillah adalah satu-satunya lapangan gerakan ummat Islam dalam militer dan perlawanan.

Pembubaran Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII)

Dari saat berdirinya sampai dipaksa membubarkan diri oleh pemerintah yaitu pada tanggal 10 Juni 1963 Presiden Soekarno membubarkan Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) dengan KEPPRES RI NO. 139/1963 yang menyatakan organisasi GPII termasuk bagian-bagiannya/cabang-cabang/ranting-rantingnya diseluruh wilayah Indonesia sebagai organisasi terlarang dan diperintahkan untuk menyatakan pembubaran organisasi GPII dalam waktu 30 hari sejak tanggal tersebut. Sampai sekarang ini keppres tersebut belum pernah dicabut dan beberapa tokohnya ditangkap dan dipenjarakan oleh rezim orde lama tanpa ada proses pengadilan.

Beberapa masalah / tuduhan yang membuat GPII harus dibubarkan :

1. Peristiwa Cikini, 30 November 1957, kunjungan Presiden Soekarno ke sekolah Perguruan Cikini sekolah dasar dan menengah, sejumlah granat meledak dan menelan banyak korban, walaupun Presiden Soekarno selamat.
2. Peristiwa lapangan IKADA, tahun 1962, penembakan Presiden Soekarno pada sholat Idul Adha.

Lahirnya Gerakan Pemuda Islam (GPI)

Wawasan idealisme GPII ternyata telah tumbuh pada pemuda yang tergabung dalam organisasi Pemuda Persatuan Ummat Islam (PPUI). Karena itu rehabilitasi yang diupayakan GPII mendapat sambutan dan pernyataan kesediaan dari PPUI yang menerima amanah tersebut. Sementara itu Persatuan Ummat Islam (PUI) yang menjadi induk dari PPUI ternyata sangat memahami dan sangat peduli terhadap permasalahan GPII saat itu. PUI mendukung niat dan kesediaan PPUI meskipun konsekuensinya PUI harus melepaskan anak organisasinya itu.

Tindak lanjutnya ialah dalam Mukktamar I PPUI tanggal 29 Juli – 1 Agustus 1967 di Bandung, dengan restu yang ikhlas dari PUI, diputuskan PPUI berstatus mandiri, tidak lagi menjadi organisasi bagian atau asuhan PUI. Keputusan Mukktamar PPUI tersebut secara implicit bermakna kesiapan PPUI menerima amanah idealisme dan perjuangan GPII.

Kesiapan PPUI ini merupakan jembatan bagi rehabilitasi gaya GPII. Langkah awal pun dimulai, dalam Sidang Dewan Organisasi (SDO) GPII terakhir yang diselenggarakan di Masjid Agung Al-Azhar Jakarta, 1 – 2 Oktober 1967, dilaksanakan serah terima misi dan platform perjuangan GPII dilimpahkan kepada PPUI. Sidang Dewan Organisasi terakhir GPII tahun 1967 ditetapkan sebagai SDO I PPUI. SDO II dan Mukernas PPUI dilaksanakan di Solo tanggal 10 – 13 November 1968, untuk memantapkan proses serah terima misi GPII kepada PPUI. Setelah program pemantapan itu dipandang cukup merata, pada tanggal 2 – 6 Oktober 1969 di Jakarta diselenggarakan SDO III PPUI untuk lebih memantapkan keberadaan PPUI sebagai pengemban misi GPII. Dalam SDO III inilah disepakati perubahan nama PPUI menjadi Gerakan Pemuda Islam (GPI).

Dalam upaya melaksanakan mekanisme suksesi kepemimpinan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar GPI, pada tanggal 2 – 5 Oktober 1972 diselenggarakan Mukktamar di Solo yang disepakati sebagai Mukktamar II GPI (melanjutkan periodisasi yang dimulai dengan Mukktamar I PPUI). Kemudian Mukktamar III GPI diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 2 – 5 Oktober 1976. Sedangkan Mukktamar IV baru dapat diselenggarakan tanggal 4 – 7 November 1996/ tanggal 22 – 25 Jumadil Akhir 1417 H di Bekasi. Lamanya tenggang waktu antara Mukktamar III dan IV disebabkan factor eksternal yang sangat represif sehingga menyulitkan GPI beraktifitas secara wajar.

Dalam Mukktamar V GPI pada tanggal 29 September – 3 Oktober 1999 di Surabaya, sebenarnya sudah diagendakan untuk digunakan kembali nama GPII. Karena tidak ada alasan lagi untuk tetap menggunakan GPI, karena rezim pemerintah yang melarang GPII dihidupkan kembali (rezim orde baru) telah tumbang. Namun kelompok tokoh tua yang punya kepentingan politis yang dimotori Drs. Anwar Shaleh, berupaya keras menggagalkan agenda kembali ke

GPII tersebut. Sehingga agenda pembahasan nama GPII yang mestinya dilakukan setelah pemilihan ketua umum, ditiadakan begitu saja.

Peserta muktamar yang tidak puas dengan hasil muktamar ini kemudian mendeklarasikan diaktifkannya kembali GPII di Jakarta pada tanggal 8 Oktober 1999 dengan Ketua Umum Darwin dan Sekjan St. Sorichi Purwadi.

Muktamar ke Muktamar

1. Anggaran Dasar untuk pertama kalinya disahkan dalam Musyawarah Pemuda Islam Indonesia pada tanggal 2 Oktober 1945 di Gedung Balai Muslimin jalan Kramat Raya No. 19 Jakarta.
2. Disempurnakan dan disahkan dalam Muktamar ke-7 GPII tahun 1956 di Surabaya.
3. Disempurnakan dan disahkan dalam Muktamar ke-8 GPII tahun 1958 di Jakarta.
4. Disempurnakan dan disahkan dalam Konperensi Besar Pemuda Persatuan Ummat Islam (PPUI) tanggal 30 Rajab 1384 H / 5 Desember 1964 M di Majalengka, Cirebon, Jawa Barat (sebab GPII pada tanggal 10 Juni 1963 Presiden Soekarno membubarkan Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) dengan KEPPRES RI NO. 139/1963).
5. Disempurnakan dan disahkan dalam Sidang Dewan Organisasi (SDO) III PPUI tanggal 24 Rajab 1389 H / 6 Oktober 1969 M di Jakarta dengan pergantian nama PPUI menjadi Gerakan Pemuda Islam (GPI).
6. Disempurnakan dan disahkan oleh Sidang Dewan Organisasi (SDO) GPI tanggal 2 Oktober 1979 di Jakarta.
7. Disesuaikan kemudian dengan UU Keormasan No. 8 tahun 1985 dalam Sidang Dewan Organisasi (SDO) GPI tanggal 5 Oktober 1987 di Mega Mendung, Bogor, Jawa Barat.
8. Disempurnakan dan disahkan dalam Muktamar IV GPI tanggal 22 – 25 Jumadil Akhir 1417 H / 4 – 7 November 1996 M di Islamic Center Bekasi, Jawa Barat.
9. Disempurnakan dan disahkan dalam Muktamar V GPI tanggal 19 – 23 Jumadil Akhir 1420 H / 29 September – 3 Oktober 1999 M di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, Jawa Timur dengan pergantian azas Islam.

10. Disempurnakan dan disahkan dalam Muktamar VI GPI tanggal 24 – 27 Muharam 1424 H / 27 – 30 Maret 2003 M di Asrama Haji Bekasi, Jawa Barat.
11. Disempurnakan dan disahkan dalam Muktamar VII GPI tanggal 21 – 24 Rabiul Akhir 1428 H / 09 – 12 Mei 2007 M di Asrama Haji Bengkulu, Propinsi Bengkulu.

Dari sejarah singkat di atas, terlihat jelas bagaimana GPI melakukan aktivitasnya di bidang politik, yang salah satunya adalah kaderisasi dan partisipasi politik yang dikhususkan kepada generasi muda umat Islam. Mereka tidak berafiliasi dengan partai politik tertentu, hanya saja dekat dengan beberapa tokoh politik Masyumi pada waktu itu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa meski tidak berafiliasi dengan partai politik, mereka tetap dapat melakukan kegiatan-kegiatan politik yang salah satunya adalah pendidikan politik.

Berdasarkan uraian di atas, baik oleh organisasi kepemudaan sayap partai politik, sayap ormas, maupun yang independen, termasuk di dalamnya mahasiswa yang saat ini seringkali diwakili oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari masing-masing kampus, memiliki antusiasme yang tinggi terhadap politik. Di setiap momentum politik nasional mereka selalu berpartisipasi. Hal ini menunjukkan bahwa minat mereka terhadap politik cukup tinggi.

BAB 5 PEMBAHASAN

Sampai dengan akhir tahun 2010, tercatat sejumlah 137 organisasi kepemudaan yang terdaftar secara resmi pada Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dari sejumlah tersebut, Deputi Pemberdayaan Pemuda Bidang Organisasi Kepemudaan membagi Organisasi Kepemudaan tersebut menjadi 3 (tiga) jenis, yakni (1) Organisasi Kepemudaan sayap partai politik; (2) Organisasi kepemudaan sayap organisasi kemasyarakatan tertentu; dan (3) Organisasi kepemudaan yang berdiri sendiri yang tidak berafiliasi baik kepada partai politik maupun ormas tertentu. Tabulasi organisasi kepemudaan tersebut dikemukakan pada table berikut ini⁸⁸ :

**TABEL 5.1
TABULASI ORGANISASI KEPEMUDAAN TAHUN 2011**

Jenis Organisasi	Afiliasi Partai Politik	Afiliasi Ormas	Mandiri/ Independen	Jumlah
ORGANISASI PEMUDA	23	25	60	108
Organisasi Kemahasiswaan	1	7	17	25
Organisasi Kepelajaran	0	3	1	4
Jumlah	24	35	77	137

Sumber : Kemenpora, 2011

⁸⁸ Kementerian Pemuda dan Olahraga, *Opcit*, hal. 43

Dari uraian di atas, terlihat jelas bahwa selama ini pemuda, baik secara individu maupun melalui organisasi kepemudaan selalu terlibat aktif dalam proses politik nasional, dalam keterlibatan tersebut dicatat oleh sejarah dengan catatan yang positif, bahkan sebagian besar tokoh perjuangan kemerdekaan adalah dari kalangan pemuda. Hal ini berarti keterlibatan pemuda dalam kehidupan politik bangsa merupakan suatu fakta yang tak terbantahkan dan memiliki catatan historis yang sangat mendalam.

Dalam konteks penelitian ini, maka keterlibatan kalangan pemuda pada bidang politik tersebut akan peneliti analisis dari aspek pendidikan politik sebagai salah satu kegiatan politik yang terjadi di suatu negara, sebagaimana tersebut dalam pengertian politik yang didefinisikan oleh Prof. Miriam Budiardjo⁸⁹ :

“politik merupakan berbagai macam kegiatan yang terjadi di suatu negara, yang menyangkut proses menentukan tujuan dan bagaimana cara mencapai tujuan itu. Lebih lanjut Miriam Budiardjo mengartikan politik sebagai tindakan yang beraneka ragam yang dilakukan oleh penguasa maupun masyarakat yang berkaitan dengan proses menetapkan tujuan dan bagaimana cara mencapai tujuan itu.”

Pendidikan politik itu sendiri, sebagaimana diuraikan pada bagian tinjauan pustaka, merupakan salah satu aspek dalam politik yang intinya merupakan sebuah proses transformasi pengetahuan mengenai politik dari satu pihak ke pihak lainnya melalui berbagai macam kegiatan. Sesuai dengan tema penelitian ini, maka hubungan pendidikan politik dengan kalangan pemuda yang dianalisis pada penelitian ini adalah peran pemuda melalui organisasi kepemudaan dalam melaksanakan kegiatan pendidikan politik tersebut. Dalam melakukan analisis terhadap peran organisasi kepemudaan dalam pelaksanaan pendidikan politik di Indonesia, peneliti akan membagi analisis tersebut menjadi dua bagian, sesuai dengan definisi dari peran yang digunakan pada penelitian ini. Sebagaimana telah peneliti jabarkan pada bagian tinjauan pustaka, bahwa peran memiliki dua pengertian yang merupakan dimensi waktu dari pelaksanaan peran tersebut. Pada bagian pertama peneliti akan mendeskripsikan mengenai apa yang selama ini telah

⁸⁹ Miriam Budiardjo, *Op.cit*, hal. 15

dilakukan oleh organisasi kepemudaan dalam melaksanakan pendidikan politik di Indonesia, dengan merujuk pada pengertian peran yang pertama, yakni merujuk pada apa yang selama ini telah dilakukan oleh suatu komunitas tertentu dalam masyarakat. Pada bagian kedua, peneliti akan membahas pelaksanaan pendidikan politik oleh organisasi kepemudaan ditinjau dari perspektif teori pendidikan politik. Pada bagian ini, peneliti akan melihat sejauh mana kesesuaian pelaksanaan pendidikan politik dengan apa yang terdapat dalam teori-teori mengenai pendidikan politik. Hal tersebut merujuk pada pengertian peran yang kedua, yakni merujuk pada apa yang seharusnya dilakukan oleh seseorang atau kelompok dalam satu komunitas masyarakat tertentu terhadap suatu pekerjaan tertentu. Apa yang seharusnya dilakukan tersebut tentunya dapat didasarkan pada teori-teori mengenai pendidikan politik yang disepakati para ahli selama ini.

5.1. Peran Organisasi Kepemudaan dalam Melaksanakan Pendidikan Politik

Dalam menguraikan pelaksanaan pendidikan politik oleh organisasi kepemudaan, penulis akan membagi uraian tersebut sesuai dengan klasifikasi organisasi kepemudaan yang disebutkan oleh Kemempora dalam Direktori Organisasi Kepmudaan Tahun 2010, sebagaimana terdapat pada tabel 5.1 di atas. Ketiga klasifikasi tersebut adalah organisasi kepemudaan sayap partai politik, organisasi kepemudaan sayap organisasi masyarakat, dan organisasi kepemudaan independen/mandiri. Untuk keperluan uraian tersebut, peneliti telah mewawancarai enam orang pengurus inti dari organisasi kepemudaan setiap klasifikasi tersebut yang peneliti anggap sebagai representasi dari klasifikasi masing-masing yang kemudian menjadi informan kunci dalam penelitian ini. Mereka antara lain adalah :

TABEL 5.2
DAFTAR ORGANISASI KEPEMUDAAN YANG MENJADI
INFORMAN PENELITIAN

No	Organisasi Kepemudaan	Klasifikasi OK	Afiliasi Politik/ Ormas /Independen	Nama Informan/Jabatan
1	Generasi Muda Demokrat Indonesia	Sayap pemuda partai politik	Partai Demokrat	Lucky Satriwiria/ Ketua Umum
2	Barisan Muda Pembaruan	Sayap pemuda partai politik	Partai Demokrasi Pembaruan	Ivan Hoe/Ketua Umum
3	Angkatan Muda Demokrat Indonesia	Sayap pemuda partai politik	Partai Demokrat	Viktor Manurung/ Ketua Umum
4	Pemuda Muhammadiyah	Sayap Ormas	Muhammadiyah	Saleh Daulay/ Ketua Umum
5	Gerakan Pemuda Islam	Independen	Independen	Ahmad Sulhi/Ketua DPD GPI Prov. DKI
6	Komite Nasional Pemuda Indonesia	Independen	Independen	Ahmad Doli Kurnia/ Ketua Umum

5.1.1. Organisasi Kepemudaan Sayap Partai Politik

Berdasarkan wawancara tersebut dengan tiga informan dari organisasi kepemudaan sayap partai politik, diperoleh gambaran secara umum mengenai kegiatan pendidikan politik yang dilakukan, yakni ada yang bersifat internal maupun bersifat eksternal. Secara internal, mereka melakukan kegiatan berupa pemberian pemahaman-pemahaman politik kepada anggota organisasi melalui pelatihan-pelatihan kader agar dapat berpartisipasi aktif khususnya dalam menyikapi proses politik yang terjadi baik internal maupun eksternal organisasi. Salah satu proses politik yang menjadi pusat perhatian organisasi kepemudaan sayap partai politik adalah pemilu atau pemilukada. Oleh karena itu, keberadaan mereka ataupun kegiatan mereka seringkali baru terlihat pada masa-masa menjelang pemilu. Hal ini merupakan sebuah kewajaran mengingat bahwa mereka adalah organisasi bentukan partai politik yang menjadi kontestan dalam pemilu tersebut. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ivan Hoe, ketua umum Barisan Muda Pembaharuan (BMP) bahwa secara internal, keberadaan BMP itu sendiri merupakan bukti adanya pendidikan politik yang dilakukan oleh anggota BMP. Ivan menyebutkan⁹⁰ :

⁹⁰ Wawancara dengan Ivan Hoe, Senin, 13 Juni 2011 bertempat di Kantor DPP Nasional Demokrat pukul 18.30 WIB

“Pertama kita kan sebenarnya waktu itu bergerak dari gerakan pembaruan PDI Perjuangan, yang mana kita menentang tiga hal yaitu pertama budaya feodal, yang kedua adalah *money politic*, dan yang ketiga adalah budaya konflik. Nah, ini adalah salah satu bagian dari pendidikan politik. Di mana dulu di PDIP kita tidak bisa melihat adanya organisasi pemuda, karena jangankan dibentuk organisasi pemuda, sayap partai saja bisa dikatakan tidak ada yang diakomodir. Bahkan Banteng Muda Indonesia saja yang ketuanya adalah salah satu ketua DPP, Roy BB Janis, itu pun hanya dianggap sebagai organisasi mitra, bukan dianggap sebagai organisasi sayap. Pasca adanya gerakan pembaharuan, barulah kemudian BMI diakomodir, kemudian Rep Dem diakomodir, lalu dibentuklah Baitul Muslimin, setelah itu ada yang namanya Taruna Merah Putih. Itu setelah adanya kritik dari dalam. Nah, semua itu adalah bentuk kaderisasi yang mendobrak kebuntuan kurangnya kaderisasi dan pelibatan golongan muda selama ini, karena kalau memang tidak terjadi regenerasi kepemimpinan dalam sebuah organisasi politik, jangankan partai politik, organisasi saja, pasti yang namanya ibarat air yang mengalir, dia akan mencari jalur-jalur lain masing-masing, karena adanya antusiasme yang tinggi dari kaum muda. Inilah yang terkait dengan pendidikan politik, yakni dalam hal kaderisasi politik yang paling penting, yakni terkait dengan perlawanan terhadap budaya feodal. Ya kalau kita lihat PDIP yang sekarang masih tetap memakai sistem feodal, hampir semua jajaran pimpinannya berusia tua, sementara yang muda-muda tidak dikasih peranan.”

Dari pemaparan Ivan di atas, dapat diperoleh gambaran bahwa keberadaan BMP sebenarnya merupakan bentuk dari ketidakpuasan kalangan muda yang ada di PDI Perjuangan yang pada saat itu sedang mempersiapkan diri untuk ikut serta pada Pemilu 2009. Ketidakpuasan tersebut kemudian diakomodir dengan membentuk organisasi kepemudaan yang seiring dengan itu terbentuklah Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) yang juga merupakan sempalan dari PDI Perjuangan dan kemudian mendaftarkan diri menjadi peserta Pemilu 2009. Hal ini berarti bahwa keberadaan BMP pada saat itu sangat terkait dengan “persiapan” kalangan muda yang sebelumnya berada di PDI Perjuangan dan kemudian menjadi sayap dari PDP menjelang Pemilu 2009. Ivan Hoe sendiri akhirnya menjadi salah satu calon anggota legislatif yang mewakili PDP untuk tingkat DPR

RI daerah pemilihan Jawa Barat V.⁹¹ Mengenai hal ini, Ivan secara tegas menyatakan bahwa :

“karena kita adalah sayap parpol, dan tujuan parpol itu sendiri, kita bicara politik praktis, yaitu merebut kekuasaan berdasarkan konstitusi atau undang-undang.”

Hal tersebut menandakan bahwa kegiatan-kegiatan kaderisasi pada organisasi sayap partai politik cenderung hanya akan marak pada saat menjelang pemilu sebagai persiapan untuk “meraih kekuasaan” sebagaimana tujuan partai politik induknya.

Sementara pada saat bukan menjelang pelaksanaan pemilu, Ivan mengakui bahwa pada saat demikian BMP tidak begitu banyak kegiatan, dan hanya sekedar menjalin komunikasi dengan beberapa jaringan organisasi kepemudaan yang selama ini dekat dengan mereka. Hal tersebut salah satunya, menurut Ivan, dipengaruhi oleh PDP yang tidak terlalu banyak meraih kursi, bahkan di tingkat DPR RI PDP tidak memperoleh satu pun kursi. Hal ini diungkapkan oleh Ivan sebagai berikut :

“Kalau saat ini kondisi secara umum pasca pemilu, kita tau ada beberapa partai yang tidak lolos parliamentary treshold, tentunya hal tersebut berdampak pada beberapa partai. Jangankan organisasi sayapnya, partainya pun berdampak. Dengan kondisi yang sekarang terjadi, untuk kepemudaannya sendiri tidak begitu banyak kegiatan, tapi kita tetap membangun komunikasi dengan beberapa kelompok atau organ-organ kepemudaan. Jadi, secara umum, karena PDP tidak ada wakil di DPR, maka secara tidak langsung berpengaruh terhadap aktivitas OK. Tapi kan kita liat, PDP juga punya beberapa perwakilan di DPRD provinsi atau kabupaten/kota. Nah, itu juga merupakan modal kita ke depan.

Demikian halnya dengan Angkatan Muda Demokrat Indonesia (AMDI), yang menurut ketua umumnya, Viktor Manurung, didirikan sebagai sayap pemuda Partai Demokrat, meski bukan satu-satunya yang mendukung Partai Demokrat terutama menghadapi Pemilu 2004 yang lalu. Kegiatan-kegiatan politik yang dilakukan, termasuk pendidikan politik, dilakukan untuk mempersiapkan kader-

⁹¹ Hasil analisis terhadap paparan Ivan Hoe mengenai proses pembentukan BMP

kader Partai Demokrat yang selanjutnya dapat ikut menjadi peserta pemilu. Sebagaimana diutarakan oleh Viktor⁹² :

“...memang seharusnya Partai Politik itu dalam mempersiapkan caleg untuk pemilu, dapat diambil dari kader-kader yang menonjol yang tersebar di berbagai organisasi kepemudaan, termasuk sayap pemuda partai tersebut.”

Selain kegiatan untuk internal, organisasi kepemudaan sayap partai politik tersebut juga melakukan kegiatan-kegiatan yang mereka kategorikan sebagai pendidikan politik secara eksternal. Sebagaimana dituturkan oleh Lucky Sastrawiria, ketua umum Generasi Muda Demokrat Indonesia (GMDI) yang menyebutkan bahwa salah satu isu yang saat ini disikapi oleh GMDI adalah pemberantasan korupsi. GMDI bersama ormas lainnya sering melakukan aksi-aksi politik untuk menentang korupsi dan mendukung pemerintah dalam rangka memberantas korupsi. Menurut Lucky, ketika ditanyakan mengenai wujud kongkrit dari pendidikan politik yang dilakukan oleh GMDI, yaitu kegiatan berupa berpartisipasi aktif dalam isu pemberantasan korupsi. Sebagaimana dikemukakan oleh Lucky Sastrawiria⁹³ :

“...demikian halnya dengan isu pemberantasan korupsi. GMDI dalam hal ini sangat peduli terhadap isu tersebut. Anda bisa lihat di website GMDI, baik aksi-aksi maupun statement politik saya terkait masalah tersebut. (menit ke 5).”

Selain berbentuk partisipasi politik, kegiatan pendidikan politik yang dilakukan oleh organisasi kepemudaan sayap partai politik secara eksternal adalah kegiatan yang dilakukan terutama pada masa-masa menjelang pemilu. Seperti yang diungkapkan oleh Ivan, bahwa BMP seringkali mengadakan kegiatan yang dikemas dalam bentuk acara yang digemari oleh pemuda seperti musik dan olahraga, akan dalam acara tersebut sekaligus disampaikan sosialisasi politik baik secara umum, maupun yang terkait dengan program partai dan organisasi. Seperti

⁹² Wawancara dengan Viktor Manurung, Jumat, 17 Juni 2011 bertempat di Kantor Konsultan Kementerian PU, pukul 09.30 WIB

⁹³ Wawancara dilakukan pada Hari Jumat, 17 Juni 2011 bertempat di Kantor DPP GMDI pada pukul 14.00 WIB

pada saat Pemilu 2009 yang lalu, mereka melakukan kegiatan atas nama BMP, namun terdapat di dalamnya simbol-simbol partai PDP yang merupakan induk dari BMP. Hal ini, menurut Ivan, merupakan kegiatan pendidikan politik sekaligus sosialisasi dan kampanye politik partai PDP maupun kampanye dirinya kepada masyarakat.

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bagi organisasi sayap partai politik, setidaknya oleh tiga organisasi kepemudaan di atas, pelaksanaan kegiatan pendidikan politik secara internal dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan kaderisasi politik seperti pelatihan kader, yang banyak ditujukan untuk mempersiapkan kader-kader partai politik induknya dalam rangka persiapan menjelang pemilu ataupun pemilukada. Meskipun demikian, kegiatan secara internal juga terkadang dilaksanakan berupa kajian internal, namun kuantitasnya tidak terlalu tinggi. Selain itu, secara eksternal, mereka juga melakukan kegiatan pendidikan politik yang dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi politik dan partisipasi politik yang kedua-duanya banyak melibatkan masyarakat luas di luar anggota atau kader organisasi tersebut.

5.1.2. Organisasi Kepemudaan Sayap Organisasi Masyarakat

Sebagaimana tersebut pada tabel 5.2 di atas, maka organisasi sayap ormas yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Pemuda Muhammadiyah, yakni ketua umumnya, Saleh Daulay. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diperoleh informasi bahwa pelaksanaan kegiatan pendidikan politik pada organisasi kepemudaan sayap ormas dapat jelas terlihat pada kegiatan-kegiatan Pemuda Muhammadiyah, baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, dalam program kerja Pemuda Muhammadiyah, terdapat kegiatan yang secara eksplisit dinamakan sebagai "Pendidikan Politik Kader". Sebagaimana dipaparkan oleh Saleh Daulay :

"...di Pemuda Muhammadiyah misalnya ada pendidikan kader, yang kemudian disebut dalam hal politik ada yang namanya pendidikan politik kader yang biasanya kita laksanakan 2-3 kali dalam satu periode, selain pendidikan lain seperti kewirausahaan, pendidikan anti narkoba, dan lain-lain."

Menurut Saleh, pendidikan politik kader itu ditujukan untuk mempersiapkan kader Pemuda Muhammadiyah agar siap menjadi pemimpin di masa depan, karena menurutnya, kader dari organisasi kepemudaan yang telah ditempa lebih mudah untuk menjadi pemimpin nasional. Sebagaimana dikatakan oleh Saleh :

“...kalau seseorang itu sudah pernah atau mantan pengurus Pemuda Muhammadiyah, ataupun organisasi kepemudaan di tingkat nasional, nanti insyaallah akan lebih mudah untuk menjadi pemimpin nasional. Dan itu tidak hanya melalui partai politik, karena bisa saja menjadi pemimpin di bidang lain, seperti pendidikan, kesehatan, ya salah satunya ya melalui partai politik itu. Seperti yang kita lihat sekarang kan banyak kader Pemuda Muhammadiyah yang tersebar di berbagai pengurus partai politik yang ada.”

Selain pendidikan politik kader, Pemuda Muhammadiyah juga seringkali mengadakan kegiatan pendidikan politik yang diperuntukkan bagi seluruh anggota organisasi kepemudaan yang selama ini intensif melakukan komunikasi dengan Pemuda Muhammadiyah. Salah satu kegiatan tersebut adalah seminar kepemudaan yang bertajuk “Menatap Masa Depan Pemuda” yang diselenggarakan pada bulan Juli 2011.⁹⁴

Hal yang juga ditekankan oleh Saleh Daulay terkait dengan pelaksanaan pendidikan politik oleh Pemuda Muhammadiyah adalah bahwa pendidikan politik dalam Pemuda Muhammadiyah sebenarnya intinya adalah pemberdayaan masyarakat, sebagaimana diungkapkan oleh Saleh berikut ini :

“...kalau organisasi lainnya mungkin berpolitik untuk mencari kekuasaan, kami bukan mencari kekuasaan tapi memberdayakan. Jadi proses berpolitiknya bukan untuk mencari kekuasaan, tapi memberdayakan masyarakat.”

Lebih lanjut Saleh juga menuturkan :

“...politik itu kan dalam segi terinya adalah tujuannya memberdayakan masyarakat, jadi politik adalah seni memberdayakan masyarakat...”

⁹⁴ Lihat di www.pemudamuhammadiyah.com

Saleh menganggap bahwa apabila Pemuda Muhammadiyah aktif dalam pemberdayaan masyarakat, maka di saat itulah terjadi pendidikan politik secara tidak langsung, baik bagi kader organisasi maupun masyarakat yang diberdayakan. Oleh karena itu, kegiatan ini dapat bersifat internal maupun eksterna. Bagi kader, pemberdayaan masyarakat dapat menjadi pembelajaran politik dalam hal bagaimana melakukan advokasi dan menyerap aspirasi masyarakat khususnya apabila terdapat kebijakan-kebijakan politik yang tidak berpihak kepada masyarakat. Pembelajaran tersebut tentunya diperlukan apabila kelak para kader menduduki posisi kepemimpinan nasional. Bagi masyarakat, mereka menjadi dapat ikut berpartisipasi dalam rangka menyuarkan aspirasi mereka. Masyarakat dalam hal itu perlu diberdayakan, misalnya dalam hal isu korupsi, Pemuda Muhammadiyah mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam Gerakan Mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi bersama Busyro Muqoddas, seperti yang dikemukakan Saleh berikut ini :

“Pemberdayaan masyarakat dalam konteks politik misalnya sekarang di Pemuda Muhammadiyah ada gerakan berantas korupsi bersama Busyro Muqoddas, nah beliau kita dukung karena meski baru setahun tapi perlu kita dukung. Nah itu bentuk kongkritnya, atau yang lainnya dalam hal kebijakan rancangan undang-undang, yang tidak berpihak pada masyarakat, kita memberikan kritisasi, masukan-masukan pada pemerintah dan juga naggota DPR yang mengambil kebijakan.....”

Terkait dengan pelaksanaan pendidikan politik tersebut, Saleh menekankan sebuah prinsip yang dimiliki oleh Pemuda Muhammadiyah, yang kemudian membedakan antara aktivitas politik mereka dengan organisasi kepemudaan sayap partai politik, yakni bahwa mereka tetap dapat berpolitik tanpa melalui partai politik, dan kegiatan-kegiatan mereka tidak dimaksudkan untuk mendukung atau berpihak pada kepentingan tertentu. Seperti ditegaskan oleh Saleh Daulay :

“...nah itu kan pendidikan politik. Tapi, kita melakukannya bukan melalui partai politik, tapi kegiatan yang kita lakukan inheren di dalamnya kegiatan pendidikan politik. Pendidikan politik itu kan pendidikan di mana seluruh warga negara diajarkan agar bisa terlibat secara aktif atau berpartisipasi aktif dalam seluruh pengambilan keputusan yang ada dalam negeri ini, nah karena itu kalo berdasarkan prinsip itu, maka Pemuda Muhammadiyah sebenarnya juga organisasi yang konsen dengan politik, karena ketidakberpolitikan Pemuda Muhammadiyah sama dengan berpolitiknya Pemuda Muhammadiyah. Kalo anda baca dalam teori *civil society* itu salah satu fungsi dari *civil society* adalah *balancing power of the government*. Jadi dia adalah semacam penyeimbang kekuatan dari pemerintah. Jadi kami memosisikan diri seperti itu. Itu yang saya sebut sebagai berpolitik tanpa partai politik, jadi kami bisa berpolitik tanpa harus mendirikan partai politik.”

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bagi organisasi sayap ormas, setidaknya bagi organisasi Pemuda Muhammadiyah, pelaksanaan kegiatan pendidikan politik secara internal dilaksanakan melalui kegiatan utama bernama “Pendidikan Politik Kader” yang ditujukan untuk mempersiapkan kader-kader Pemuda Muhammadiyah sebagai bekal bila nanti menjadi pemimpin nasional, yang tidak melulu harus melalui jalur partai politik atau pun menjadi pemimpin politik, melainkan bisa menjadi pemimpin nasional dalam bidang pendidikan, dalam bidang kesehatan, dan lain-lain. Mereka juga mengadakan kegiatan berupa seminar kepemudaan yang bersifat internal tetapi juga melibatkan anggota organisasi kepemudaan lainnya. Selain itu, secara eksternal, kegiatan-kegiatan pendidikan politik bagi mereka dikemas dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, yang dapat berbentuk sosialisasi politik, dan juga advokasi dalam bentuk partisipasi politik. Bagi Pemuda Muhammadiyah, pendidikan politik merupakan kegiatan yang inheren dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat yang mereka lakukan selama ini.

5.1.3 Organisasi Kepemudaan Independen

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ahmad Doli Kurnia, ketua umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan Ahmad Sulhi, ketua umum Gerakan Pemuda Islam (GPI), diperoleh informasi bahwa dalam hal pelaksanaan kegiatan-kegiatan organisasi, termasuk kegiatan politik, senada dengan Saleh Daulay, merekapun menegaskan independensi mereka dari kepentingan partai politik. Sebagaimana dinyatakan oleh Doli Kurnia :

“...wajah KNPI sekarang ini lebih independen, lebih demokratis, lebih mandiri, dan itu pada akhirnya berpengaruh di dalam setiap aktivitasnya. Pasca reformasi ini, betul-betul independen, yakni tidak lagi ada intervensi-intervensi dalam proses penetapan pimpinan-pimpinan di dalam KNPI.”

Demikian juga yang diungkapkan oleh Ahmad Sulhi, Ketua DPD GKI Provinsi DKI Jakarta :

“...jadi kita tidak pernah mendukung salah satu partai politik atau calon atas nama organisasi, kita tidak berpartai politik jadi bebas. Jadi selama di GPI kita tidak boleh mendorong agar GPI mendukung partai politik tertentu. Hingga saat ini GPI masih independen, yang cenderung jadi agen kontrol kebijakan.”

Terkait dengan pelaksanaan pendidikan politik, Doli Kurnia menyebutkan bahwa karena KNPI merupakan wadah berhimpun organisasi kepemudaan yang ada, baik yang sayap partai politik maupun yang independen, maka dengan sendirinya KNPI jelas memiliki kegiatan-kegiatan yang bersifat politik, termasuk pendidikan politik. Seperti yang Doli utarakan berikut ini :

“Sebenarnya kalo kita bicara tentang pendidikan politik sejatinya keberadaan KNPI itu sendiri sudah menunjukkan adanya aktivitas pendidikan politik buat anak-anak muda. Karena, seperti yang saya katakan tadi, bahwa orang yang berhimpun di KNPI ini adalah para aktivis-aktivis politik berasal dari organisasi kepemudaan masing-masing. Jadi, di dalam internal organisasi kepemudaannya masing-masing, itu dinamika politiknya juga sudah tinggi. Dan sebetulnya organisasi-organisasi kemasyarakatan pemuda ini kan ketika dia berbentuk sebuah organisasi, di mana dalam organisasi itu bicara tentang leadership, bicara tentang manajemen, bicara tentang komunikasi, dan segala macam. Itu semua menjadi sesuatu modal yang besar ke depan dan menjadi bagian dari pendidikan politik sebetulnya. Nah, jadi, *day to day* di KNPI ini sebetulnya semua orang sudah melakukan dan mendapatkan pendidikan politik.”

Bagi Doli Kurnia, aktivitas apa pun yang dilakukan oleh kader KNPI merupakan bagian dari pendidikan politik, karena di dalamnya terdapat pembelajaran berupa cara memimpin orang lain, mengelola organisasi, memenangkan persaingan, dan sebagainya. Oleh karena itu, aktivitas KNPI saat ini, baik internal maupun eksternal, tidak melulu bertajuk politik, tetapi bersifat lebih luas. Sebagaimana dikemukakan oleh Doli Kurnia :

“Jadi sekarang aktivitasnya spektrumnya lebih luas. Kalau dulu mungkin lebih pada menekankan pada aspek-aspek politik, sekarang sudah melebar ke mana-mana, artinya bukan hanya politik saja, aktivitasnya bisa aktivitas sosial, aktivitas pengembangan ekonomi, seperti *enterpreunership*. Itulah yang sekarang membuat KNPI berbeda dengan yang dulu, karena pandangan saya bahwa ketika orang masuk di organisasi kepemudaan, apalagi masuk di KNPI, dia secara tidak langsung sebetulnya sudah punya interest dengan politik, dan dia mendapatkan atau melakukan pendidikan politik itu sendiri.”

Bagi organisasi Gerakan Pemuda Islam, kegiatan politik yang mereka lakukan selama ini adalah berupa kajian-kajian politik secara terbuka di tengah-tengah masyarakat melalui kegiatan berbentuk diskusi yang dikemas dalam bentuk kegiatan tertentu. Kegiatan tersebut salah satunya bernama Diskusi Politik dan Nonton Bareng Final Piala AFF yang diselenggarakan pada bulan Oktober 2010. Penekanan yang diberikan oleh Ahmad Sulhi kaitannya dengan kegiatan tersebut adalah bahwa kegiatan pendidikan politik tidak hanya mereka

selenggarakan pada masa-masa menjelang pemilu, tapi juga pada saat jauh sebelum pemilu. Hal inilah yang mungkin mendasari GPI untuk membuat diskusi politik yang dikemas dalam bentuk nonton bareng. Ahmad memaparkan :

“Pada masa selain pemilu, kegiatan pendidikan politik kami yaitu kajian-kajian, diskusi, misalnya nonton bareng tapi ada diskusi politiknya, seperti pada saat final Piala AFF kita nonton bareng mengundang KPU, KESBANGPOL Kemendagri, dan bersifat terbuka untuk masyarakat. Kemudian misalnya ada lembaga penelitian yang membutuhkan tenaga peneliti, kita distribusikan anggota kita untuk terlibat dalam kegiatan penelitian politik itu...”

Selain itu, GPI juga melaksanakan kegiatan pendidikan politik berupa pembelajaran bagi kadernya dalam hal kepemiluan. Kegiatan tersebut nantinya dapat bermanfaat apabila mereka, bersama masyarakat, berpartisipasi dalam pemilu, yakni aktif menjadi pemantau pemilu bahkan menjadi penyelenggara pemilu. Seperti yang diungkapkan oleh Ahmad Sulhi :

“.....jadi kita berperan serta aktif dalam pengembangan pendidikan politik kepada masyarakat, dalam pemilu kita jadi pemantau, atau bahkan jadi penyelenggara seperti KPU maupun panwaslu.”

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bagi organisasi independen, setidaknya bagi organisasi KNPI dan GPI, pelaksanaan kegiatan pendidikan politik secara internal dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan internal organisasi, baik itu melalui pelatihan dasar organisasi, manajemen kepemimpinan, dan sebagainya, maupun yang bersifat khusus seperti kepemiluan. Secara eksternal, kegiatan pendidikan politik tersebut dapat berupa kajian-kajian yang terbuka untuk masyarakat luas, ataupun aksi-aksi politik yang juga melibatkan masyarakat luas. Artinya, secara eksternal pun mereka melakukan pendidikan politik dalam bentuk sosialisasi politik melalui kajian-kajian maupun partisipasi politik melalui aksi-aksi ataupun keikutsertaan secara aktif dalam momen-momen politik seperti pemilu atau pemilukada.

Terkait dengan independensi terhadap kepentingan politik tertentu, peneliti memiliki catatan terhadap independensi tersebut. Menurut peneliti, antara organisasi kepemudaan sayap ormas dengan organisasi independen terdapat perbedaan yang signifikan terkait dengan independensi tersebut, yakni bahwa organisasi sayap ormas hanya independen dari partai politik, tetapi tidak independen dari ormas induknya. Hal ini tentunya berimplikasi kepada ajaran-ajaran ataupun nilai-nilai yang diajarkan dalam organisasi sayap ormas, termasuk nilai-nilai politik, yang merupakan turunan dari nilai-nilai politik yang dianut oleh ormas induknya. Hal ini berbeda dengan organisasi independen yang memang tidak berafiliasi, baik dengan partai politik maupun dengan ormas tertentu. Meskipun demikian, sangat dimungkinkan apabila organisasi independen juga ditunggangi oleh kepentingan politik tertentu, yang dapat bersifat ad hoc maupun permanen, mengingat bahwa kepentingan politik tidak dapat dilepaskan dari keberadaan sebuah organisasi, termasuk organisasi kepemudaan yang berkecimpung dalam dunia perpolitikan nasional.⁹⁵

Untuk memperoleh paparan yang lebih objektif mengenai pelaksanaan pendidikan politik oleh organisasi kepemudaan, peneliti juga melakukan wawancara dengan Nurhasan Saidi, Anggota DPR RI Komisi X yang membidangi masalah kepemudaan. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara mendalam dengan pihak Kementerian Pemuda dan Olah Raga, dalam hal ini dari Deputi Bidang Penyadaran dan Pemberdayaan Pemuda, yaitu Faisal Al Izlami yang merupakan Asisten Asdep Bidang Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga RI.⁹⁶ Dari kedua narasumber tersebut peneliti memperoleh informasi bahwa secara umum organisasi kepemudaan saat ini, baik yang sayap partai politik maupun yang independen, telah menyelenggarakan kegiatan pendidikan politik melalui organisasi masing-masing. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Nurhasan Saidi :

⁹⁵ Hasil analisis peneliti berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga pimpinan organisasi kepemudaan non sayap partai politik, yakni Pemuda Muhammadiyah, KNPI, dan GPI.

⁹⁶ Wawancara dilakukan pada Hari Selasa, 28 Juni 2011 bertempat di Kantor Kemenpora RI pada pukul 14.00 WIB

“Saat ini, beberapa organisasi kepemudaan sudah banyak yang mulai menyelenggarakan pendidikan politik itu, baik dari underbow partai politik maupun yang independen, bahkan *kan* ada anggarannya misalnya dari KPU atau Kemendagri...”

Sedangkan Faisal Al Izlami, Asisten Asdep Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga RI (Kemenpora), menguatkan pernyataan Nurhasan Saidi dengan menyatakan bahwa organisasi kepemudaan saat ini juga sudah ada yang mulai melakukan kegiatan pendidikan politik, meskipun belum sepenuhnya menjadi fokus kegiatan organisasi mereka. Menurut Faisal, saat ini organisasi kepemudaan masih disibukkan dengan penyelesaian permasalahan internal mereka seperti konsolidasi anggota dan pengurus.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diperoleh gambaran secara umum mengenai bagaimana organisasi kepemudaan-baik organisasi kepemudaan yang merupakan sayap partai politik, sayap ormas, maupun yang mandiri atau independen-selama ini dalam melaksanakan kegiatan pendidikan politik yang tentunya didasarkan pada pemahaman masing-masing terhadap politik dan pendidikan politik. Selanjutnya, akan dianalisis bagaimana pelaksanaan pendidikan politik tersebut oleh organisasi kepemudaan ditinjau dari perspektif teori mengenai pendidikan politik, yang pada akhirnya akan dapat diperoleh gambaran mengenai apakah peran yang selama ini dilakukan sudah sesuai dengan apa yang seharusnya sebagaimana terdapat dalam teori mengenai pendidikan politik.

5.2. Analisis

Pada bagian ini, terlebih dahulu peneliti akan menguraikan kembali teori-teori pendidikan politik yang telah peneliti simpulkan berdasarkan definisi-defnisi yang dikemukakan para ahli, yang telah peneliti kemukakan pada bagian tinjauan pustaka. Sebagaimana dikemukakan pada bagian tersebut, bahwa kegiatan pendidikan politik merupakan sarana dalam melakukan transformasi pengetahuan dan nilai-nilai politik ideal dan yang hendak dibangun, yang dapat dilakukan oleh berbagai institusi politik yang ada, agar nantinya masyarakat mengetahui hak-hak politiknya dan dapat berpartisipasi aktif dalam sistem politik di negaranya.

Kegiatan pendidikan politik tersebut dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kaderisasi politik, sosialisasi politik, dan partisipasi politik. Selanjutnya, peneliti akan menganalisis pelaksanaan pendidikan politik oleh organisasi kepemudaan ditinjau dari perspektif pendidikan politik sebagaimana tersebut dalam definisi di atas. Analisis tersebut akan didasarkan pada pelaksanaan pendidikan politik oleh tiga klasifikasi organisasi kepemudaan sebagaimana terdapat dalam tabel 5.2 di atas.

5.2.1. Organisasi Kepemudaan Sayap Partai Politik

5.2.1.1. Kaderisasi Politik

Peran organisasi kepemudaan yang merupakan sayap partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik tidak dapat terlepas dari eksistensi partai politik yang menjadi induknya. Hal ini merupakan kewajiban mengingat bahwa organisasi kepemudaan tersebut memang sangat terkait erat dengan partai politik, terlebih lagi jika sedari awal organisasi tersebut dibentuk oleh partai politik induknya. Organisasi kepemudaan tersebut antara lain Gerakan Muda Demokrat Indonesia (GMDI) dan Angkatan Muda Demokrat Indonesia yang didirikan oleh tokoh-tokoh Partai Demokrat, kemudian Gerakan Pemuda Kebangkitan Bangsa (Garda Bangsa) yang didirikan oleh tokoh-tokoh Partai Kebangkitan Bangsa, Angkatan Muda Partai Golkar yang didirikan oleh Partai Golkar, Gerakan Pemuda Keadilan yang didirikan oleh Partai Keadilan Sejahtera. Selain itu, ada juga organisasi kepemudaan yang tidak didirikan oleh partai politik induknya tetapi setelah berdiri menyatakan mendukung partai politik tertentu, seperti Barisan Muda Pembaruan yang mendukung Partai Demokrasi Pembaruan, lalu Gerakan Muda Ka'bah yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Ketergantungan terhadap partai politik tersebut, didukung oleh peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia yang mengaitkan antara organisasi kepemudaan sayap partai politik dengan partai politik induknya. Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 12 huruf j Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik disebutkan bahwa "Partai Politik berhak membentuk dan memiliki organisasi sayap Partai Politik".

Keterkaitan yang sangat erat antara organisasi kepemudaan sayap partai politik dengan partai politik induknya seperti diuraikan di atas, dalam konteks penelitian ini, terlihat dalam pandangan mengenai pendidikan politik yang dikemukakan oleh pimpinan organisasi kepemudaan sayap partai politik tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Lucky, ketua GMDI :

“tujuan pendidikan politik bagi GMDI adalah untuk memberikan bekal yang cukup bagi setiap kader sebelum nanti menjadi anggota legislatif.”

Penuturan Lucky di atas menunjukkan adanya alur yang jelas dalam hal kaderisasi politik yang dilakukan baik oleh partai politik maupun oleh organisasi kepemudaan yang bersangkutan. Hal senada juga diungkapkan oleh Ivan Hoe, ketua BMP :

“Kita dilibatkan dalam kemenangan pemilu PDP, saya sendiri adalah caleg untuk DPR RI di daerah pemilihan Jawa Barat V. Nah, ini adalah bagian dari kaderisasi partai.”

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, maka secara teoritis dapat dikatakan bahwa kegiatan-kegiatan pendidikan politik dari organisasi kepemudaan sayap partai politik memang akan sangat terkait dengan partai politik induknya, dan oleh karena partai politik merupakan sarana untuk ikut seleksi kepemimpinan politik nasional melalui pemilu, maka kegiatan kaderisasi organisasi kepemudaan sayap partai politik tersebut juga tentunya ditujukan utk menyiapkan kader-kader partai politik tersebut untuk mengikuti seleksi kepemimpinan nasional itu.

Disamping penyiapan kader dan mengenai tujuan meraih kekuasaan, keterkaitan tersebut juga akan berimplikasi kepada materi yang diajarkan dalam pendidikan politik melalui kegiatan kaderisasi politik. Materi tersebut tentu tidak akan bersifat netral, melainkan yang sejalan dengan ideologi politik partai politik induknya. Hal ini di satu sisi akan menggiring kader organisasi kepemudaan sayap partai politik untuk hanya memahami sebagian saja dari keseluruhan pemahaman mengenai politik yang seharusnya diajarkan. Pemahaman demikian pada

gilirannya akan berdampak pada keterbatasan kader dalam memahami, memaknai dan menyikapi fenomena-fenomena politik yang nanti akan dihadapinya, yang jika terjadi kesalahan dalam pemaknaan dan penyikapan tersebut tentunya akan berdampak negative bagi dirinya, kelompoknya, dan mungkin bagi masyarakat luas.

5.2.1.2. Sosialisasi Politik

Keterkaitan erat dengan partai politik induk sebagaimana tersebut di atas, juga berimplikasi pada kegiatan pendidikan politik melalui sosialisasi politik organisasi sayap partai politik. Dapat dikatakan bahwa nilai-nilai yang diajarkan dalam pendidikan politik kepada masyarakat luas melalui sosialisasi politik merupakan nilai-nilai yang tidak netral dan tentu sesuai dengan nilai-nilai politik yang dianut oleh partai politik induknya. Hal demikian tentunya akan mempengaruhi persepsi dan reaksi yang muncul dari masyarakat yang menjadi objek sosialisasi, sesuai dengan apa yang disebutkan dalam teori sosialisasi politik.

Oleh karena itu, biasanya kegiatan semacam itu baru marak ketika menjelang momen politik akan berlangsung seperti pemilu atau pilukada, yang bertujuan untuk mensosialisasikan nilai-nilai politik partai politik kepada masyarakat dengan tujuan akhir yakni merebut simpati rakyat yang pada akhirnya diharapkan akan mendukung mereka pada pemilu atau pilukada. Pencerdasan semacam ini, dalam konteks pendidikan politik murni, tentunya kurang dibenarkan karena tidak merujuk transformasi pengetahuan dan nilai-nilai politik ideal yang hendak dibangun, tapi semata-mata merujuk pada bagaimana merebut simpati rakyat dengan tujuan untuk meraih kekuasaan.

5.2.1.3. Partisipasi Politik

Kegiatan pendidikan politik melalui partisipasi politik organisasi kepemudaan sayap partai politik juga sangat terkait erat dengan partai politik induknya. Partisipasi tersebut tentunya akan sesuai dengan arahan dari partai politik induknya, yang akan menentukan kebijakan yang disikapi, bentuk aksi, pelaksana aksi, dan tujuan aksi, yang merupakan komponen dari pengertian

partisipasi politik. Partisipasi tersebut, apabila melibatkan masyarakat luas di luar kader dan simpatisan partai politik induknya, maka diperlukan sosialisasi politik terlebih dahulu dalam rangka menyamakan sikap politik terhadap isu politik yang akan disikapi. Pada saat itulah nilai-nilai politik yang dianut oleh partai politik induknya akan disosialisasikan kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi politik sebagaimana diuraikan sebelumnya.

Dalam konteks itu, maka pendidikan politik yang diberikan pada masyarakat lagi-lagi tidak akan bersifat komprehensif membahas mengenai pemahaman politik yang benar, melainkan akan disesuaikan dengan pemahaman ataupun mazhab politik yang dianut oleh para pemimpin politik dari partai politik induk. Hal ini tentunya juga kurang dibenarkan bila ditinjau dari perspektif teori pendidikan politik, sebagaimana juga yang telah diuraikan di atas.

5.2.1.4. Kesimpulan (Organisasi Sayap Partai Politik)

Beberapa kesimpulan yang diperoleh dari beberapa uraian di atas adalah sebagai berikut :

1. Keberlangsungan peran organisasi kepemudaan sayap partai politik dalam pelaksanaan pendidikan politik di Indonesia akan tergantung dengan eksistensi partai politik induknya.
2. Peran tersebut akan dapat dirasakan oleh masyarakat apabila partai politik induknya juga eksis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan politik untuk masyarakat, termasuk dalam melaksanakan kegiatan pendidikan politik.
3. Dalam pelaksanaan peran tersebut, organisasi kepemudaan sayap partai politik tidak bebas dan tidak netral dalam menentukan materi yang diajarkan dalam pendidikan politik, karena harus sesuai dengan apa yang menjadi kebijakan partai politik induknya.
4. Pelaksanaan pendidikan politik oleh organisasi kepemudaan yang sangat terkait dengan partai politik induknya, membuat pendidikan politik yang diberikan menjadi kurang efektif, karena tidak didasarkan pada pemahaman terhadap politik yang komprehensif, tetapi didasarkan pada pemahaman politik partai politik yang bisa saja hanya menganut aliran politik tertentu.

5.2.2. Organisasi Kepemudaan Sayap Organisasi Masyarakat

5.2.2.1. Kaderisasi Politik

Sebagaimana diketahui, bahwa organisasi kepemudaan sayap ormas merupakan bentukan ormas untuk memperluas jaringan khususnya di kalangan pemuda. Dalam hal ini, keberadaan organisasi sayap ormas pada taraf tertentu menjadi sama dengan organisasi sayap partai politik. Hanya saja perbedaannya bahwa organisasi sayap ormas memang tidak terikat/independen dari partai politik, akan tetapi terikat dengan ormas induknya.

Senada dengan organisasi sayap partai politik, maka keterikatan tersebut tentunya juga berimplikasi pada kegiatan pendidikan politik melalui kaderisasi politik yang dilakukan. Oleh karena itu, kaderisasi politik dalam organisasi kepemudaan sayap ormas pada gilirannya merupakan sarana untuk menyiapkan kader-kader politik bagi ormas induknya yang nantinya dapat tersebar di berbagai posisi kepemimpinan nasional, yang salah satunya juga dapat melalui partai politik. Pendidikan politik dalam kegiatan kaderisasi politik tersebut juga menjadi sarana transformasi nilai-nilai politik yang dianut oleh ormas induknya kepada kader-kader. Hal demikian tentunya bila ditinjau dari teori pendidikan politik menjadi hal yang kurang sesuai, karena transformasi pengetahuan politik secara mendalam yang diberikan akan sebatas nilai-nilai politik yang dianut ataupun sesuai dengan pemikiran politik ormas induknya.

5.2.2.2. Sosialisasi Politik

Demikian halnya dengan kegiatan pendidikan politik melalui sosialisasi politik dari organisasi kepemudaan sayap ormas, bahwa karena mereka dibentuk oleh ormas induknya, maka nilai-nilai yang diajarkan dalam pendidikan politik melalui kegiatan sosialisasi politik kepada masyarakat merupakan nilai-nilai yang tidak netral, melainkan sesuai dengan nilai-nilai politik yang dianut oleh ormas induknya, yang kemudian akan menentukan persepsi dan reaksi yang muncul dari masyarakat yang menjadi objek sosialisasi. Hal ini tentunya membuat kegiatan sosialisasi politik tersebut rentan dengan “pesanan politik” yang kemudian akan mengutamakan kepentingan tertentu. Karena saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa banyak terdapat ormas yang kemudian secara historis memiliki

keterikatan dengan partai politik tertentu, seperti Muhammadiyah dengan Partai Amanat Nasional, Masyumi dengan Partai Bulan Bintang, Nahdhatul Ulama (NU) dengan Partai Kebangkitan Bangsa, dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan sosialisasi politik yang dilakukan biasanya melibatkan tokoh-tokoh dari partai politik tertentu yang biasanya sekaligus menjadi tokoh dari ormas tersebut. Hal ini tentunya akan mempengaruhi persepsi dan reaksi masyarakat terhadap afiliasi politik organisasi kepemudaan dan ormas induknya tersebut, yang pada akhirnya akan mempengaruhi sikap politik masyarakat terhadap organisasi kepemudaan dan ormas induknya tersebut. Di sinilah rentan terjadi penyimpangan dalam proses transformasi pengetahuan politik yang diberikan melalui kegiatan sosialisasi politik kepada masyarakat, yang mana akan diarahkan untuk menguntungkan kepentingan politik partai tertentu. Dalam perspektif demikian, maka pernyataan bahwa organisasi kepemudaan sayap ormas bersifat independen dari partai politik, tidak dapat sepenuhnya dikatakan benar, karena secara historis ormas induknya terkadang memiliki afiliasi politik dengan partai politik tertentu.

5.2.2.3. Partisipasi Politik

Kegiatan pendidikan politik melalui partisipasi politik dari organisasi kepemudaan sayap ormas cenderung sesuai arahan dari ormas induknya, yang akan menentukan kebijakan yang disikapi, bentuk aksi, pelaksana aksi, dan tujuan aksi. Oleh karena itu, konsistensi dalam berpartisipasi politik dari organisasi kepemudaan sayap ormas juga akan mengikuti konsistensi dan eksistensi ormas induknya, sebagai konsekuensi dari ikatan yang sangat kuat antara keduanya.

Hal tersebut, pada gilirannya juga kemudian akan mempengaruhi konsistensi mereka dalam pelaksanaan pendidikan politik di masa yang akan datang.

5.2.2.4. Kesimpulan (Organisasi Kepemudaan Sayap Ormas)

Berdasarkan uraian di atas, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Keberlangsungan peran organisasi kepemudaan sayap ormas dalam pelaksanaan pendidikan politik di Indonesia akan tergantung dengan eksistensi ormas induknya.
2. Peran tersebut akan dapat dirasakan oleh masyarakat apabila ormas induknya juga memiliki perhatian yang besar dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.
3. Dalam pelaksanaan peran tersebut, organisasi kepemudaan sayap ormas tidak bebas menentukan materi yang diajarkan dalam pendidikan politik, melainkan harus sesuai dengan nilai-nilai politik yang dianut oleh ormas induknya. Pada kondisi tertentu, organisasi kepemudaan sayap ormas juga dapat ditunggangi oleh kepentingan partai politik tertentu, terutama bagi organisasi kepemudaan sayap ormas yang ormas induknya memiliki afiliasi politik dengan partai politik tertentu.

5.2.3. Organisasi Kepemudaan Independen

5.2.3.1. Kaderisasi Politik

Kegiatan pendidikan politik dari organisasi kepemudaan independen, ditinjau dari perspektif pendidikan politik dalam kegiatan kaderisasi politik dapat dikatakan bahwa apabila organisasi kepemudaan independen tersebut telah lama terbentuk dan memiliki catatan historis yang kuat, maka kaderisasinya cenderung stabil dan kontinyu. Hal demikian dapat terjadi karena kader organisasi kepemudaan independen tersebut saat ini tentunya tersebar di berbagai lini kepemimpinan nasional, karena kegiatan kaderisasi tersebut sudah berlangsung lama. Kesimpulan ini didasarkan kepada pengertian kaderisasi politik yang merupakan sebuah kegiatan untuk mempersiapkan kader organisasi untuk ikut dalam seleksi kepemimpinan nasional. Sebagai contoh, banyak kader Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) yang saat ini merupakan tokoh politik nasional yang bahkan pernah atau saat ini memiliki kekuasaan politik yang cukup signifikan, yang merupakan buah dari kaderisasi politik organisasi tersebut di masa yang lalu.

organisasi lainnya selain HMI adalah Gerakan Pemuda Islam (GPI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Persatuan Mahasiswa Kristen Republik Indonesia (PMKRI).

Karena sifatnya yang independen, maka pendidikan politik dalam kegiatan kaderisasi politik organisasi independen cenderung lebih bersifat netral dan normatif, meskipun tetap disesuaikan dengan garis politik organisasi tersebut.

5.2.3.2. Sosialisasi Politik

Kegiatan pendidikan politik melalui kegiatan sosialisasi politik yang dilaksanakan oleh organisasi independen, dapat dianalisis sebagai berikut :

1. Pendidikan politik yang dilakukan cenderung bersifat kajian politik untuk masyarakat, dan pengetahuan politik yang ditransformasikan lebih bersifat “netral” dalam pengertian tidak mengarah kepada keberpihakan terhadap pihak tertentu akan tetapi lebih kepada nilai-nilai politik yang ideal dan bersifat filosofis serta normatif.
2. Hal demikian membuat kegiatan-kegiatan tersebut memungkinkan untuk dilaksanakan tidak hanya pada saat menjelang momen-momen pemilu.
3. Dengan demikian, pelaksanaan pendidikan politik cenderung lebih netral apabila dilaksanakan oleh organisasi independen, dengan catatan organisasi tersebut tidak ditunggangi oleh kepentingan politik tertentu yang bisa saja bukan atas nama partai politik atau ormas, melainkan atas nama individu yang memiliki afiliasi politik dengan pihak tertentu.

5.2.3.3. Partisipasi Politik

Kegiatan pendidikan politik melalui partisipasi politik oleh organisasi independen bila dianalisis berdasarkan teori partisipasi politik adalah sebagai berikut :

1. Aksi, konten kebijakan, dan tujuan aksi cenderung lebih bebas karena memang tidak berafiliasi kepada kepentingan mana pun.

2. Akan tetapi, netralitas tersebut terkadang justru membuat mereka dapat dipengaruhi oleh berbagai kepentingan yang ada. Hal ini terutama terjadi pada organisasi kepemudaan independen yang memiliki masalah finansial, sehingga mereka seringkali dimanfaatkan oleh kepentingan lain yang bersedia membantu dengan catatan organisasi tersebut mau menggalang massa untuk memperjuangkan gagasan dari kepentingan tersebut.
3. Kesepakatan politik seperti demikian biasanya bersifat ad hoc atau tidak permanen, sehingga organisasi kepemudaan yang bersangkutan tetap dapat bersifat independen.

5.2.3.4. Kesimpulan (organisasi independen)

Beberapa kesimpulan yang diperoleh mengenai pelaksanaan pendidikan politik oleh organisasi kepemudaan independen, bila ditinjau dari perspektif teori pendidikan politik adalah antara lain :

1. Keberlangsungan peran organisasi independen dalam menyelenggarakan pendidikan politik sangat tergantung dengan pengalaman dan eksistensi organisasi tersebut sebagai organisasi kepemudaan di Indonesia.
2. Bagi organisasi independen yang memiliki catatan historis yang kuat dan hingga kini masih eksis, kader-kader politiknya saat ini tentunya tersebar di berbagai lini kepemimpinan nasional. Kondisi tersebut membuat organisasi independen tersebut cenderung lebih stabil dalam berperan dalam melaksanakan pendidikan politik di Indonesia.
3. Dalam pelaksanaan peran tersebut, organisasi independen relatif lebih bebas menentukan materi yang diajarkan dalam pendidikan politik, karena tidak terikat dengan kepentingan politik tertentu.
4. Akan tetapi, kondisi demikian pada kasus tertentu, apabila didukung oleh kader mereka yang saat ini berafiliasi atau bahkan menjadi kader dalam partai politik tertentu, maka bukan tidak mungkin dalam pelaksanaan pendidikan politik tersebut, kegiatan tersebut juga akan menjadi tidak netral, dan akan diarahkan pada keberpihakan pada kepentingan tertentu.

5.3. Harapan Stakeholder Terhadap Organisasi Kepemudaan Dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik di Indonesia

Sebagaimana dikemukakan pada bagian tinjauan pustaka, bahwa pada intinya harapan merupakan penilaian individu terhadap hasil yang hendak dicapai dengan kenyataan yang sedang terjadi. Dalam konteks penelitian ini, harapan stakeholder sebagaimana dimaksud di atas adalah penilaian bagaimana seharusnya pendidikan politik itu dilaksanakan yang kemudian dibandingkan dengan kenyataan yang selama ini ditunjukkan oleh organisasi kepemudaan.

Dalam rangka menggali informasi mengenai harapan stakeholder, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan pihak Kemenpora dalam hal ini Faizal Al Izlami, Asisten Asdep Deputi Pemberdayaan Pemuda Kemenpora; kemudian Nurhasan Saidi, Anggota DPR RI Komisi X bidang Kepemudaan; dan Ahmad Doli Kurnia, Ketua Umum KNPI.

Berdasarkan wawancara tersebut, diperoleh beberapa pandangan yang mengandung unsur harapan tersebut. Faizal mengungkapkan bahwa setidaknya dalam pelaksanaan pendidikan politik tersebut organisasi kepemudaan dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Kemasan kegiatan dibuat sekreatif mungkin sehingga tidak membuat masyarakat jenuh. Karena sebenarnya mereka sudah jenuh dengan politik, sehingga khawatir kegiatan tersebut tidak akan menarik.
2. Materi kegiatan tidak hanya membahas politik dalam arti sempit saja, tetapi politik dalam arti luas, yang ditujukan untuk menyelamatkan dan memberdayakan bangsa ini.

Menurut Faizal, selama ini organisasi kepemudaan memang telah melaksanakan kegiatan pendidikan politik, namun belum sepenuhnya focus ke sana. Kemasannya pun masih monoton berbentuk kajian dan seminar, sedangkan tidak semua pemuda yang tertarik mengikuti kajian atau seminar. Materinya pun seringkali hanya membahas politik praktis saja, terutama yang merupakan sayap partai politik.

Ketika ditanyakan hal yang sama, Nurhasan Saidi berpendapat bahwa :

“OK harus menyelenggarakan pendidikan politik, khususnya misalnya ke masyarakat, karena masyarakat sekarang ini kan dalam demokrasi ini belum siap, jadi OK harus memberikan pendidikan politik bagi masyarakat, misalnya dalam pemilu, kan masyarakat butuh dalam hal memilih pemimpinnya. Nah selain itu, selain yang menjelang pemilu, karena pendidikan politik itu aspeknya luas, jadi bisa diberikan wawasan kenegaraan, wawasan kepedulian membangun negara, jadi kontennya banyak untuk diberikan kepada masyarakat”

Lebih lanjut, Nurhasan memberikan catatan sebagai berikut :

1. Kegiatan pendidikan politik harus diarahkan kepada pembentukan kader-kader yang siap menjadi pemimpin.
2. Salah satu unsur yang dapat menjadi materi dalam pendidikan politik adalah pola manajerial kepemimpinan.
3. Kegiatan pendidikan politik oleh anak muda harus dijadikan sebagai ajang pembelajaran diri dalam berpolitik sebagai modal pada saat menjadi pemimpin nasional yang sebenarnya.

Selanjutnya, Ahmad Doli Kurnia juga mengemukakan pandangannya yang juga mengandung harapan terhadap organisasi kepemudaan, termasuk kepada KNPI setelah masa kepengurusannya, sebagai berikut :

1. Pemahaman politik yang diberikan dalam pendidikan politik adalah yang diarahkan kepada kepentingan yang lebih besar, yakni kepentingan bangsa dan negara, yang sering disebut sebagai *high politics*.
2. Dalam pelaksanaan pendidikan politik itu, pemuda jangan kepada permainan politik jangka pendek, apalagi untuk kepentingan-kepentingan yang sempit misalnya kepentingan seperti itu untuk kepentingan kelompok tertentu atau bahkan kepentingan individu kita.
3. Dalam partisipasi politiknya, pemuda jangan hanya mewakili masyarakat saja, melainkan yang terpenting adalah menyalurkan aspirasi masyarakat. Tentang hal ini, Doli Kurnia menyebutkan :

“Kebanyakan sekarang hanya mewakili masyarakat saja, tapi tidak menyalurkan aspirasi, jadi sama dengan partai politik.”

Berdasarkan narasi di atas, maka uraian mengenai harapan stakeholder terhadap organisasi kepemudaan dalam rangka pelaksanaan pendidikan politik di Indonesia, yang juga ditinjau dari teori harapan, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Unsur pendidikan politik yang dinilai terkait dengan **usaha yang selama ini dilakukan** oleh OK dengan **hasil yang hendak dicapai** antara lain adalah mengenai pelaksana, tujuan, bentuk, frekuensi, dan materi pendidikan politik.
2. Bagi stakeholder, pelaksana pendidikan politik salah satunya dapat dilakukan oleh kalangan pemuda karena pemuda memiliki karakter yang memadai untuk melaksanakan pendidikan politik
3. Tujuan pendidikan politik yang diharapkan oleh stakeholder adalah masyarakat menjadi “melek” dan paham terhadap politik dalam arti luas, tidak hanya seputar kekuasaan saja.
4. Bagi stakeholder, bentuk pendidikan politik yang dilakukan dapat lebih variatif ketimbang berbentuk kajian yang cenderung membosankan.
5. Stakeholder juga mengharapkan frekuensi kegiatan pendidikan politik dapat lebih ditingkatkan lagi, dan tidak hanya sekedar dilaksanakan menjelang pemilu saja untuk meraih simpati masyarakat.
6. Materi yang diharapkan berupa pengetahuan dan nilai-nilai politik ideal yang hendak di bangun, dan juga didasarkan kepada definisi politik yang lebih luas dan komprehensif.

BAB 6

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan pertanyaan penelitian dan uraian pada bagian pembahasan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Terkait dengan peran organisasi kepemudaan dalam pelaksanaan pendidikan politik di Indonesia, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
 - a. Peran organisasi kepemudaan dalam melaksanakan pendidikan politik tersebut sangat terkait dengan jenis organisasi, afiliasi politik, dan eksistensi organisasi kepemudaan tersebut selama ini.
 - b. Pelaksanaan pendidikan politik oleh Organisasi Kepemudaan selama ini dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan kaderisasi politik, sosialisasi politik, dan partisipasi politik.
 - c. Ditinjau dari sudut pandang tersebut, maka pelaksanaan peran Organisasi Kepemudaan tersebut sudah sesuai dengan teori-teori yang mendefinisikan pendidikan politik, yakni mencakup tiga aspek politik tadi.
 - d. Hanya saja yang menjadi catatan adalah, pemahaman politik yang diberikan dalam kegiatan pendidikan politik belum sesuai dengan apa yang selama ini diberikan oleh OK. Pemahaman yang diberikan seringkali bersifat parsial, yang hanya membahas sebagian saja dari sekian banyak aspek politik yang sangat luas.
 - e. Mengenai munculnya orientasi yang berlebihan terhadap politik praktis seputar kekuasaan dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - 1) Orientasi tersebut apabila tidak berlebihan, merupakan sebuah kewajaran, bahkan menjadi hak politik setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses perebutan kekuasaan di Indonesia. Oleh karena itu ada kegiatan pemilu atau pemilukada, yakni dalam rangka mengakomodir orientasi tersebut.

- 2) Orientasi tersebut menjadi bermasalah ketika tarafnya berlebihan, yang rentan muncul apabila proses kaderisasi politik yang diadakan hanya dalam rangka menjelang prosesi pergantian kekuasaan seperti pemilu atau pilukada.
 - 3) Hal tersebut dapat terjadi apabila pemahaman terhadap politik yang diperoleh dalam kegiatan pendidikan politik tidak komprehensif dan hanya terfokus pada bagaimana meraih kekuasaan saja.
 - 4) Indikasi munculnya orientasi yang berlebihan tersebut dapat terlihat apabila kalangan pemuda hanya disibukkan pada kegiatan-kegiatan politik yang secara langsung berkaitan dengan kekuasaan saja, seperti kampanye pemilu, mobilisasi massa untuk mendukung kepentingan tertentu, mencalonkan diri sebagai caleg, dan lain sebagainya.
 - 5) Dari perspektif teori pendidikan politik, banyak kegiatan politik yang dapat dilakukan oleh kalangan muda yang bukan berbicara seputar kekuasaan, seperti kajian undang-undang politik, advokasi hak-hak politik masyarakat, menjadi pemantau atau pengawas pemilu, bahkan menjadi penyelenggara pemilu.
 - 6) Berdasarkan uraian tersebut, peneliti berpendapat bahwa selama ini pelaksanaan pendidikan politik masih gagal atau belum dapat dikatakan berhasil karena meskipun organisasi kepemudaan telah melaksanakan kaderisasi politik, sosialisasi politik, dan partisipasi politik yang di dalamnya terdapat unsure pendidikan politik, tetapi hal itu belum cukup karena pelaksanaan tersebut masih bermasalah terutama dalam hal tujuan dan materi pendidikan politik. Hal inilah, yang menurut peneliti menjadi penyumbang yang signifikan terhadap munculnya orientasi yang berlebihan terhadap politik praktis seputar kekuasaan bagi kalangan pemuda.
2. Terkait dengan harapan stakeholder terhadap OK dalam rangka pelaksanaan pendidikan politik di Indonesia, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
- a. Bahwa harapan stakeholder belum sepenuhnya menjadi kenyataan seperti yang dilaksanakan oleh OK selama ini.

- b. Harapan tersebut yang belum sepenuhnya diperlihatkan oleh organisasi kepemudaan saat ini adalah terutama terkait dengan tujuan, frekuensi dan materi kegiatan pendidikan politik.

6.2. Saran

Beberapa saran yang direkomendasikan berdasarkan hasil penelitian ini antara lain :

1. Kepada pihak Kemenpora, pada saat menyusun petunjuk teknis mengenai pelaksanaan pendidikan politik di Indonesia, perlu memperhatikan keberadaan organisasi kepemudaan yang ada saat ini, terkait dengan jenis, afiliasi politik, serta eksistensi organisasi
2. Terhadap fenomena bahwa terdapat orientasi yang berlebihan di kalangan pemuda terhadap politik praktis seputar kekuasaan, pihak Kemenpora yang menjadi leading sector dalam hal penyadaran dan pemberdayaan pemuda di Indonesia, dapat melakukan hal berikut ini :
 - a. Mengadakan dan/atau menambah frekuensi kegiatan yang berbentuk fasilitasi kegiatan politik secara terstruktur dan sistematis dalam rangka pelaksanaan pendidikan politik untuk melakukan transformasi pengetahuan politik yang lebih komprehensif dan mencakup kepada aspek politik yang lebih luas kepada generasi muda. Kegiatan tersebut dapat berupa kajian politik yang disisipkan pada acara-acara yang menarik bagi pemuda maupun masyarakat secara umum, seperti nonton bareng final sepakbola dengan komentator dari praktisi politik yang juga penggemar bola, atau juga dalam bentuk kegiatan musik yang mengiringi diskusi politik. Aliran musik yang digunakan tergantung segmen pemuda atau masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan, misalnya dangdut, rock, atau pop. Selain itu, bentuk lainnya adalah dengan menggunakan media elektronik seperti televise, yang dapat diselenggarakan dalam bentuk lenong politik, atau bahkan sinetron yang bercerita mengenai pendidikan politik.

- b. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, pihak Kemenpora dapat bekerja sama dengan Organisasi Kepemudaan terutama yang bersifat independen, mengingat bahwa mereka tidak terikat dengan kepentingan politik lain. Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan juga bekerja sama dengan pihak media.
3. Kedua upaya Kemenpora tersebut juga diharapkan dapat menjadi strategi dalam mengatasi adanya ketimpangan antara pelaksanaan pendidikan politik yang selama ini telah dilakukan oleh OK dengan harapan yang dimiliki oleh stakeholder.
4. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, diperlukan penelitian lebih lanjut terhadap permasalahan yang sama, akan tetapi ditambahkan informan yang berasal dari tokoh pemuda dan masyarakat umum, yang diharapkan dapat menambah informasi mengenai masalah penelitian ini.
5. Selain itu, rekomendasi lainnya adalah diperlukan penelitian selanjutnya mengenai strategi yang dapat dilakukan dalam rangka mengembangkan pendidikan politik di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Alfian. (1986). *Masalah dan Prospek Pembangunan Politik di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Gramedia.
- Alfian. (2000). *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Anderson, Benedict. (1988). *Java in Time of Revolution : Occupation and Resostence 1944-1946*, edisi Indonesia, *Revolusi Pemuda : Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
- Andrews, Collin ac. & Mas'oed, Muchtar. (1986). *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Budiardjo, Miriam. (2010). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. edisi revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Craswell, John W. (1994). *Research Design : Qualitative & Quantitative Approach*. California: Sage Publication
- Ethridge, Marcus E., & Handelman, Howard. (1994) *Politics in a Changing Society:A Comparative Introduction To Political Science*. New York: St. Martins Press.
- Fakih, Mansour. (1999). *Pendidikan politik untuk rakyat*. Yogyakarta: Penerbit INSIS.
- Friedrich, Carl J. (1946). *Constitutional Government and Democracy*. Boston : Ginn and Company..
- G. Sartori. (1976). *Parties and Party Systems*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hague, Rod. et al. (1998). *Comparative Government and Politics An Introduction*. London : MacMillan Press Ltd,.
- Hendrarso, Emy Susanti, (2005). *Penelitian Kualitatif : Sebuah Pengantar*, dalam Bagong Suyano & Sutinah (Ed), *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Prenada Media.
- Idrus, Muhammad. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Penerbit Erlangga. Jurnal DEBAT Pemuda. (2009) Edisi Pertama, Jakarta
- Kantaprawira, SH., Dr.H.Rusadi. (1988). *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar*. Cetakan Kelima (Cetakan Pertama 1977). Bandung: CV. Sinar Baru.

- Kavang, Dannis. (1998). *Political Culture*. Bandung: Armico
- Kementerian Pemuda dan Olahraga. (2010). *Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga 2010-2014*. Jakarta: Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- Larana, Hank., Gustfild, Joseph R., & Johnston, Enrique. (1994). *New Social Movement : From Ideology to Identity*. Philadelphia: Temple University Press.
- Mannheim, Karl. (1950). *Diagnosis of Our Time : Wartime Essay of a Sociologist*. International Library of Society: Amazon.co.uk
- McClosky, Herbert. (1972). *Political Participation, International Encyclopedia of The Social Sciences*. New York: MacMillan company and The Free Press.
- Mooney, James D. (1974). *The Principles of Organization*. revised. English: Harper edition.
- Nelson, Joan M., & Huntington, Samuel P. (1977). *No Easy Choice : Political Participation in Developing Countries*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press
- Neumann, Sigmund. (1963). *Modern Political Parties*. Apter, David E., & Eckstein, Harry. *Comparative Politics : A Reader*. London: The Free Press of Glencoe.
- Palapa, Jimmy. (1987). *Pendidikan Politik di Kalangan Generasi Muda*. Jakarta: FISIP UI.
- Pradiansyah, Arvan dan Adnan, Ricardi S. (1999). Bab III: Gerakan Mahasiswa untuk Reformasi. Selo Soemardjan (ed). *Kisah Perjuangan Reformasi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Rasyid, Prof. Ryas. (1999). *Nasionalisme dan Demokrasi Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Ridwan HR. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rush, M. (1992). *Politics and Society : An Introduction to Political Sociology*. New York: Harvester Wheatsheaf.
- Schulze, J. William. (1949). Some Definition. Albert Lepawsky, (ed.), *Administration : The Art and Science of Organization and Management*. New York: Alfred A. Knopf.

- Scott, William G. (1962). *Human Relation in Management : A Behavioral Science Approach*. New York: McGraw-Hill.
- Strauss, Anselm., & Corbin, Juliet. (2003). *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Surbakti, Ramlan. (2010). *Memahami Ilmu Politik*, edisi revisi. Jakarta: Grasindo.
- Sutarto. (1983). *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta: UGM Press.
- Wibowo, Eddi., dkk. (2004). *Ilmu Politik Kontemporer*. Yogyakarta: YPAPI
- Wiranu, Khatibul Umam. (2010). *Sejarah Konsensus Politik Indonesia : Kajian Filosofis*. Jawa Barat: Saung Buku.
- Zent, Gary J., Fine , I. V., & Vosting, J. H. (1976). *Purchasing in Management : Materials in Motion*, p.27. Sutarto. *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta: UGM Press

Sumber Online

Mudjia Rahardjo, *Jenis dan Metode Penelitian Kualitatif dalam Materi Kuliah Online*, dalam <http://mudjiarahardjo.com/materi-kuliah/215-jenis-dan-metode-penelitian-kualitatif.html>.

www.organisasi.org

www.ngada.org.

www.pemudamuhammadiyah.org

www.gerakanpemudaislam.wordpress.com